

381-18

MW

2 4

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERILAKU PKL TERHADAP PERDA NO. 11/2000
DI KECAMATAN SEMARANG TENGAH**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi

Konsentrasi : Magister Administrasi Publik



DIAJUKAN OLEH :

OKKI NAVARONE W
NIM : D4E000122

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

2002

UPT-PUSSTAK-UNDIP



PERNYATAAN

Dengan ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tesis yang saya ajukan ini adalah hasil karya sendiri yang belum pernah diajukan dalam memperoleh gelar pada program Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang ataupun pada program lainnya. Selain itu juga tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali yang tertera pada daftar referensi. Karya ini adalah milik saya sehingga tanggung jawab sepenuhnya di tangan saya.

Semarang, 25 September 2002

Okki Navarone W, S.E.

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PKL TERHADAP PERDA NO. 11/2000 DI KECAMATAN SEMARANG TENGAH

NAMA : OKKI NAVARONE W, S.E.

NIM : D4E000122

Tesis telah dipertahankan di depan penguji :

Tanggal :

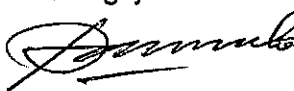
26 September 2002

Ketua Penguji



Drs. Ali Mufiz, M.P.A.

Penguji I



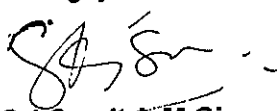
Drs. Purwoko, S.U.

Sekretaris Penguji



Drs. Hardi Warsono, M.TP.

Penguji II

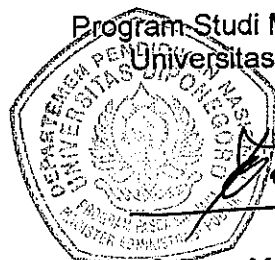


Dra. Sri-Suwitri, M.Si.

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Sains.

Tanggal, 26 September 2002

Program Studi Magister Administrasi Publik
Universitas Diponegoro Semarang



Ketua



Prof. Drs. Y. Warella, M.P.A., Ph.D.

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillaahir rahmaanir rahiim
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Inna rabbaka huwa a'lamu bi man dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadiin.

Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah Yang Paling Mengetahui siapa yang sesat dari jalannya; dan Dia-lah Yang Paling Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

(Al-Qalam : 7)

RINGKASAN

Penelitian ini menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah dalam implementasi Perda N.o.11/2000. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan PKL di Semarang yang tidak lepas dari kebijakan publik yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang. Keberadaan PKL menjadi fenomenal, karena pada satu sisi seringkali sektor ini dianggap mengganggu ketertiban kota, namun pada sisi lain mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

Setelah melihat kajian dari hasil penelitian terhadap 81 responden PKL, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting seperti :

1. Perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah antara lain dalam menjaga kebersihan masih cukup rendah. Selebihnya perilaku mereka terhadap lalu lintas, kewajiban retribusi, menjaga keamanan dan ketertiban dapat dikatakan cukup baik dengan asumsi tidak ada gejala lainnya.
2. Karakteristik PKL di Kecamatan Semarang Tengah pada umumnya berpendidikan rendah dengan rata-rata usaha yang cukup lama, cenderung berjenis kelamin laki-laki dengan golongan usia yang merata serta modal usaha yang kecil. Hal ini jelas bahwa perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah tampak erat kaitannya dengan karakteristik PKL tersebut di mana perilaku mereka yang kurang dalam memahami Perda No.11/2000.
3. Pemahaman PKL terhadap perda tersebut rendah dengan indikasi 64,2 % responden tidak paham terhadap perda tersebut. Hal ini juga diperkuat bahwa sebagian besar responden (65,2 %) tidak merasa membutuhkan pembinaan dan penyuluhan yang intensif karena pemerintah kurang tegas dan kegiatan penyuluhan yang sudah ada tampaknya tidak diminati oleh responden. Selain itu, sebagian besar responden (60,5 %) juga kurang setuju jika usaha PKL di trotoar melanggar perda tersebut. Bahkan 72,9 % responden yang diteliti mengklaim bahwa usaha mereka tidak mengganggu keindahan kota (Tabel IV.32). Yang agak memprihatinkan adalah 54,2 % responden (Tabel IV.34) merasa tidak berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan usaha mereka. Sementara mengenai larangan berjualan di lokasi-lokasi tertentu lainnya, 64,2 % responden (Tabel IV. 35) menyatakan tidak paham dan menurut mereka hal itu hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh pemerintah untuk menarik retribusi.
4. Dari variabel karakteristik lingkungan PKL dapat ditarik kesimpulan mengenai kebersihan dimana 71,6 % responden (tabel IV.36) menyatakan bahwa kondisi lingkungan usaha mereka yang bersih terbatas pada usaha di kios PKL tempat mereka sendiri. Hal ini tampak dari 61,8 % responden (tabel IV.37) berpendapat tidak setuju terhadap kios PKL yang di atas saluran air dapat merusak lingkungan, namun pada kenyataannya mereka selalu membuang limbah ke saluran air tanpa melihat lebih lanjut lagi. Selain hal-hal di atas, kondisi arus lalu lintas, keamanan dan ketertiban cukup baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa diantara faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku PKL terhadap Perda No.11/2000, ternyata terlihat bahwa kurangnya pemahaman terhadap perda menunjukkan pengaruh yang mengkhawatirkan terhadap perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah. Hal ini menunjukkan walaupun para PKL merasa berfaku tertib, taat, menjaga kebersihan kiosnya sendiri, keamanan, serta membayar retribusi, akan tetapi sebagian besar diantara mereka belum memahami Perda No.11/2000. Alhasil perilaku PKL tersebut masih jauh dari harapan yang diinginkan dengan dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik beserta tingkat pemahaman terhadap perda yang rendah.

ABSTRACT

Keywords : The Behavior of PKL, Characteristics of PKL, Perda No. 11/2000

The aim of research in this thesis which entitled Analysis Factors Influencing Behavior of PKL in District of Central Semarang with Perda No.11/2000 in The District of Central Semarang is to know how far the behavioral of PKL to by law. This research is designed as research having the character of out for explanatory see relation between characteristic of PKL, understanding of to Perda No.11/2000, environmental characteristic of PKL, to behavior of PKL. While approach the used are quantitative and qualitative approach. The qualitative approach is meant to enrich understanding and descriptive in data analysis.

Samples in the research are all PKL in The District of Central Semarang which amount to with sample counted 81 people from totalizing amount 912 people of PKL with formula of Rao after taken by percentage per region in the 9 sub-district with technique of cluster sampling random. Data collecting conducted by using interview and questionnaires.

The thesis using analysis of non correlations parametric and of crosstabs this find that variable of understanding of Perda No. 11/2000 in the reality have weak relation with behavior of PKL. This matter can be proved with analysis qualitative, for example 64,2 % respondents expressing thig doesn't that prohibition order selling represent effort to take care of continuity of environment. That way also understanding of respondents about Perda No. 11/2000 counted 64,2 % respondents express that they doesn't understand about Perda No.11/2000 the with quantitative analysis shown with number of rank Kendall showing 0,160 with significant, 0,054, bigger than α values pecified that is 5 % (0,05) though attenuate. That thing earn to be assumed that behavior of PKL doesn't depend on understanding of Perda No. 11/2000.

Thereby can be concluded that this research indicate that among factors influencing behavior of PKL to Perda No.11/2000, in the reality variable of the understanding of to Perda show influence which doesn't significant to behavior of PKL in The District Of Central Semarang. This matter show although all PKL feel to go into effect order, obedient, keep cleaning, security, and also pay for retribution, however most among they not yet comprehended Perda No.11/2000.

ABSTRAKSI

Kata Kunci : Perilaku PKL, Karakteristik PKL, Perda No. 11/2000

Tujuan penelitian dalam tesis ini yang berjudul Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah terhadap Perda No.11/2000 di Kecamatan Semarang Tengah adalah untuk mengetahui sejauh mana perilaku PKL terhadap pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian yang bersifat penjelasan (eksplanatorial) yang berusaha untuk melihat hubungan antara karakteristik PKL, pemahaman terhadap Perda No.11/2000, karakteristik lingkungan PKL, terhadap perilaku PKL. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memperkaya deskripsi dan pemahaman dalam analisis data.

Sampel penelitian ini adalah para PKL di Kecamatan Semarang Tengah yang berjumlah dengan 81 orang dari total jumlah 912 orang PKL dengan rumus Rao setelah diambil persentase per wilayah di 9 kelurahan dengan teknik cluster random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara.

Dalam tesis yang menggunakan analisis non parametric correlations dan crosstabs ini menemukan bahwa variabel pemahaman Perda No. 11/ 2000 ternyata memiliki hubungan yang lemah dengan perilaku PKL. Hal ini dapat dibuktikan dengan analisis kualitatif, antara lain 64,2 % responden yang menyatakan ketidak pahaman bahwa larangan berjualan merupakan usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan. Demikian pula kepeahaman responden tentang Perda No. 11/2000 sebanyak 64,2 % responden menyatakan bahwa mereka tidak paham tentang Perda No.11/ 2000 tersebut Dengan analisis kuantitatif ditunjukkan dengan angka rank Kendall yang menunjukkan 0,160 dengan signifikansi 0,054, lebih besar dari nilai α yang ditetapkan yaitu 5 % (0,05) meskipun tipis. Hal itu dapat diasumsikan bahwa perilaku PKL tidak tergantung pada pemahaman Perda No. 11/ 2000.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa diantara faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku PKL terhadap Perda No.11/2000, ternyata variabel Pemahaman terhadap Perda menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah. Hal ini menunjukkan walaupun para PKL merasa berlaku tertib, taat, menjaga kebersihan, keamanan, serta membayar retribusi, akan tetapi sebagian besar diantara mereka belum memahami Perda No.11/2000.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Syukur dan Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas tesis dengan judul ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PKL TERHADAP PERDA NO. 11/2000 DI KECAMATAN SEMARANG TENGAH.

Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi syarat kelulusan dan mencapai gelar M.Si (S-2) di Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. Penulisan tesis ini memang jauh dari kata sempurna, namun segala keterbatasan dan kekurangannya akan menjadi pengalaman ilmiah bagi penulis di masa yang akan datang. Dengan demikian segala saran dan kritik yang sifatnya memperbaiki tesis ini akan dapat diterima sepenuhnya.

Tidak lupa pula dalam akhir yang bahagia ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga dan selalu dikenang kepada :

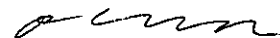
1. Bapak. Drs Ali Mufiz M.P.A. dan Drs Hardi Warsono, M.T.P selaku Pembimbing tesis.
2. Prof. Drs. Y. Warella, M.P.A, Ph.D. selaku Ketua Program Studi MAP UNDIP.
3. Bapak Drs Purwoko, S.U., selaku dosen penguji beserta Ibu Dra. Sri Suwitri, M.Si, dan Dra. Susi Sulandari, M.Si yang telah memberikan arahan pada ujian tesis.
4. Segenap dosen dan karyawan MAP yang tak kenal lelah.
5. Semua rekan di MAP khususnya Angkatan II Reguler yang telah membantu segenap jiwa dan raganya sejak awal kuliah.

6. Segenap PKL yang menjadi responden di Kecamatan Semarang Tengah yang telah membantu pengisian kuesioner.
7. Rekan-rekan Angkatan XV MM-UNDIP yang telah memberikan bantuan teknis.
8. Bank BNI'46 Wilayah 12 Jakarta yang telah banyak memberikan bantuan dana finansial.
9. Ayah, Ibu, Saudara, kerabat, dan, sanak keluarga yang telah membantu dengan jiwa dan raganya.
10. Segenap PKL di seputar UNDIP.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu disini yang telah membantu penyusunan tesis serta penyelesaian studi di MAP UNDIP sehingga dapat selesai sesuai jadwal yang diharapkan. Amin.

Wassalam Wr. Wb.

Semarang, 25 September 2002



Penulis

Okki Navarone W, S.E.

NIM : D4E000122

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
SERTIFIKAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
RINGKASAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Perumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1. Tujuan Teoritis	13
2. Tujuan Praktis	13
3. Tujuan Umum	14
4. Kegunaan Penelitian	14
E. Sistematika Pembahasan Penelitian	15

BAB II TELAHAH PUSTAKA	16
A. Landasan Teori	16
2.1. Perilaku PKL	16
2.2. Karakteristik PKL	20
2.3. Pemahaman Kebijakan Perda No. 11/2000	24
2.3.1. Metodologi Analisis Kebijakan	29
2.3.2. Prosedur Analisis Kebijakan	30
2.3.3. Elemen Kebijakan	31
2.3.4. Kerangka Analisis Kebijakan	33
2.3.5. Implementasi Kebijakan	34
2.4. Karakteristik Lingkungan PKL	38
2.5. Hubungan Karakteristik PKL dengan Perilaku PKL	39
2.6. Hubungan Pemahaman Terhadap Perda dengan Perilaku PKL	40
2.7. Hubungan Karakteristik Lingkungan PKL dengan Perilaku PKL	40
2.8. Hubungan Karakteristik PKL, Pemahaman Terhadap Perda, Karakteristik Lingkungan PKL dengan Perilaku PKL	41
B. Pembahasan Penelitian Yang Relevan	41
C. Hipotesis	42
 BAB III METODE PENELITIAN	 44
A. Rancangan Penelitian	44
B. Ruang Lingkup Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian	45
D. Variabel Penelitian	45
1. Klasifikasi Variabel	45
2. Definisi Konseptual	46

3. Definisi Operasional	48
4. Jenis dan Sumber Data	49
E. Instrumen Penelitian	50
F. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	51
G. Teknik Pengumpulan Data	54
H. Teknik Analisis Data	55
I. Jadwal	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	58
A. Hasil Penelitian	58
A.2. Identitas Responden	59
A.2. Perilaku PKL	64
A.3. Karakteristik PKL	72
A.4. Pemahaman Perda No. 11/2000	79
A.5. Karakteristik Lingkungan PKL	85
B. Analisis Hasil Penelitian	89
B.1. Uji Validitas Dan Reliabilitas	89
B.2. Kategorisasi Variabel Penelitian	90
1. Perilaku PKL	91
2. Karakteristik PKL	91
3. Pemahaman Perda No. 11/2000	92
4. Karakteristik Lingkungan PKL	93
B.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian dengan Crosstabs	94
1. Hubungan Karakteristik PKL dengan Perilaku PKL	94
2. Hubungan Pemahaman Perda No. 11/2000 dengan Perilaku PKL	96

3. Hubungan Karakteristik Lingkungan PKL dengan Perilaku PKL	98
C. Hubungan Antar Variabel dengan Kendall's Tau_B	99
C.1. Hubungan Karakteristik PKL dengan Perilaku PKL	99
C.2. Hubungan Pemahaman Perda No. 11/2000 dengan Perilaku PKL	100
C.3. Hubungan Karakteristik Lingkungan PKL dengan Perilaku PKL	101
C.4. Hubungan Karakteristik PKL, Pemahaman Perda No. 11/2000, dan Karakteristik Lingkungan PKL dengan Perilaku PKL	101
D. Diskusi	103
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	110
 DAFTAR REFERENSI	 113
LAMPIRAN	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Elemen Kebijakan	32
Gambar II.2 Kerangka Analisis Kebijakan	34
Gambar II.3 Geometrical Model Hipotesis	42

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Penentuan Jumlah Persentase Sampel PKL	53
Tabel III.2	Penentuan Jumlah Persentase Sampel-PKL	54
Tabel IV.1	Jenis Kelamin Responden	59
Tabel IV.2	Umur Responden	60
Tabel IV.3	Komposisi Tingkat Pendidikan Responden	61
Tabel IV.4	Lokasi Usaha	61
Tabel IV.5	Jenis Usaha	62
Tabel IV.6	Lama Usaha	63
Tabel IV.7	Usaha Menjaga Kebersihan	64
Tabel IV.8	Usaha Membantu Petugas Kebersihan	65
Tabel IV.9	Usaha Menjaga Kebersihan Kios	66
Tabel IV.10	Partisipasi Mengantisipasi Tindak Kejahatan ..	67
Tabel IV.11	Usaha Menjaga Keterlibatan dan Keamanan	68
Tabel IV.12	Upaya Tidak Mengganggu Kelancaran Lalu Lintas	68
Tabel IV.13	Upaya Tidak Mengganggu Pejalan Kaki	69
Tabel IV.14	Lahan PKL Tidak di Atas Saluran Air dan Trotoar	70
Tabel IV.15	Membayar Retribusi	71
Tabel IV.16	Upaya Menjaga Kelestarian Kota	71
Tabel IV.17	Memilih PKL Sebagai Pekerjaan Tetap	72
Tabel IV.18	Pembatasan Waktu Usaha	73
Tabel IV.19	Usaha PKL Akan Berkembang di Masa Mendatang	74
Tabel IV.20	PKL Tidak Membutuhkan Modal Besar	74
Tabel IV.21	PKL Membutuhkan Pendidikan Tinggi	75
Tabel IV.22	Pendapatan Mampu Mengembangkan Usaha	76

Tabel IV.23	Barang/Jasa Yang Dijual Tidak Terjangkau Harganya	76
Tabel IV.24	Lama Melakukan Usaha	77
Tabel IV.25	Pria Lebih Dibutuhkan Daripada Wanita	78
Tabel IV.26	Dibutuhkan Tenaga Kerja Dewasa dan Produktif	78
Tabel IV.27	Jenis Usaha Terkait Dengan Lingkungan	79
Tabel IV.28	Paham Isi Perda No.11/2000	80
Tabel IV.29	Pembinaan dan Penyuluhan Menambah Ketaatan pada Perda No. 11/2000	80
Tabel IV.30	Setiap Usaha PKL Wajib Membayar Retribusi	81
Tabel IV.31	PKL di Trotoar Melanggar Perda No.11/2000	82
Tabel IV.32	Mendirikan Usaha di Tempat Larangan Mengganggu Keindahan	82
Tabel IV.33	Kewajiban Menjaga Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Usaha	83
Tabel IV.34	Berkewajiban Menjaga Kebersihan Lingkungan Usaha	84
Tabel IV.35	Larangan Berjualan di Tempat terlarang	84
Tabel IV.36	Kondisi Lingkungan Usaha	85
Tabel IV.37	PKL di Atas Saluran Air Merusak Lingkungan	86
Tabel IV.38	Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	86
Tabel IV.39	Lingkungan Cocok Untuk Tempat Usaha	87
Tabel IV.40	Situasi Lalu Lintas Rawan Kecelakaan	88
Tabel IV.41	Kondisi Tempat Usaha Rawan Kejahatan	88
Tabel IV.42	Sikap Warga Terhadap PKL	89
Tabel IV.43	Kategorisasi Variabel Perilaku PKL.....	91
Tabel IV.43	Kategorisasi Variabel Karakteristik PKL.....	92
Tabel IV.45	Kategorisasi Variabel Pemahaman Perda No. 11/2000.....	93
Tabel IV.46	Kategorisasi Variabel Karakteristik Lingkungan PKL.....	94

Tabel IV.47	Crosstabs Hubungan Karakteristik PKL dengan Perilaku PKL	95
Tabel IV.48	Signifikansi Z-Score.....	96
Tabel IV.49	Crosstabs Hubungan Pemahaman Perda dengan Perilaku PKL	97
Tabel IV.50	Signifikansi Z-Score.....	97
Tabel IV.51	Crosstabs Hub. Karakteristik Lingkungan PKL dengan Perilaku PKL	98
Tabel IV.52	Signifikansi Z-Score.....	99
Tabel IV.53	Correlations Hubungan Karakteristik PKL dengan Perilaku PKL.	100
Tabel IV.54	Correlations Hubungan Pemahaman Perda dengan Perilaku PKL....	100
Tabel IV.55	Corr. Hub. Karakteristik Lingkungan PKL dengan Perilaku PKL.....	101
Tabel IV.56	Correlations Hubungan Antara Karakteristik PKL, Pemahaman Perda No. 11/2000, Karakteristik Lingkungan PKL dengan Perilaku PKL	102
Tabel IV.57	Koefisien Konkordansi Kendall's.....	103

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kondisi nasional secara umum sejak pertengahan tahun 1997 ditandai dengan berbagai aspek yang tidak menguntungkan, seperti fundamental perekonomian yang lemah, turunnya nilai mata uang rupiah, tingginya tingkat pengangguran, meningkatnya jumlah kemiskinan, meluasnya berbagai masalah sosial masyarakat, dan berbagai permasalahan yang menyangkut kehidupan semakin terlihat sangat memprihatinkan. Dengan melihat latar belakang tersebut maka kota Semarang juga mengalami keadaan yang kurang menguntungkan (Semarang, 2000:1).

Keadaan ini menimbulkan beberapa permasalahan di kota Semarang sehingga menimbulkan berbagai dampak yang perlu ditangani dengan seksama. Salah satu aspek yang ditimbulkan oleh kondisi perekonomian nasional adalah meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di kota Semarang. Salah satu faktor dari meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di kota Semarang merupakan imbas dari meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan peluang lapangan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan. Selain itu peluang kerja yang terbatas, terlebih lagi untuk pekerjaan di sektor formal memerlukan beberapa persyaratan yang tidak mudah diikuti oleh para tenaga kerja yang berpendidikan minim. Dengan demikian banyak dari para tenaga kerja yang beralih ke sektor informal seperti menjadi pedagang kaki lima sebagai salah satu peluang lapangan pekerjaan yang cukup potensial (Widodo, 2000: 3).

Keberadaan pedagang kaki lima kadangkala membuat perdebatan pro dan kontra dalam penanganannya (Kompas, 10 April 2001). Namun diketahui bahwa dalam krisis ekonomi yang telah melanda Indonesia sejak tahun 1997 lalu, sektor informal yang lebih dikenal dengan sebutan PKL ini merupakan sektor pengaman dalam bidang ekonomi dan tenaga kerja (Semarang, 2000:1). Hal ini dengan indikasi adanya kenaikan sebanyak 65 % jumlah PKL di Semarang sejak tahun 1997 dimana kini jumlahnya di kota Semarang telah mencapai 25.000 orang yang terjun ke sektor informal ini (Kompas, 10 April 2001). Namun dari jumlah tersebut hanya 11.029 pedagang saja yang terdaftar.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota Semarang khususnya di Kecamatan Semarang Tengah hingga saat ini menurut sebagian besar masyarakat kota Semarang masih sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan karena lokasinya yang mengambil tempat sangat strategis di berbagai sudut kota. Selain itu produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat harganya sangat kompetitif sementara jenisnya juga sangat bervariasi sehingga menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.

Menurut data yang diperoleh dari Unit Pelaksana Daerah (UPD) Pelaksana PKL Dinas Pasar Kota Semarang, hingga akhir tahun 2000 lokasi yang paling banyak PKL adalah Kecamatan Semarang Tengah (2.661), Semarang Timur (2201), Semarang Barat (1.458), dan Semarang Selatan (1.418). Bahkan, banyak kios ataupun kapling PKL yang kini diperjual belikan dengan harga tinggi, bervariasi antara Rp 20 juta-Rp 30 juta untuk kios permanen. Hal ini menjadi suatu permasalahan tersendiri mengingat tidak ada peraturan yang mengatur soal jual beli tersebut.

Pertumbuhan PKL di kota Semarang merupakan masalah dilematis. Hal ini bersifat dilematis karena menyangkut nafkah masyarakat kecil berdasar dari pendapat Kepala Unit Pelaksana Daerah PKL Dinas Pasar Kota Semarang, Drs Agus Wahyudi, dan berdasarkan penjelasan dari Kepala Dinas Pasar, Utomo Sutopo. Salah satu dilema yang sangat menonjol adalah sebagian PKL banyak yang melanggar ketentuan tentang Penetapan Lahan/Lokasi PKL (Joglo Pos, 1-15 Mei 2002). Di lain pihak, keberadaan PKL yang tidak tertata jelas mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum dalam arti tata kota yang modern. Bahkan untuk mengontrol PKL resmi yang terdaftar dan berizin pun, pemerintah mengalami berbagai kendala. Dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang mencoba melakukan terobosan dengan menyerahkan pembinaan dan pengaturan mengenai berbagai permasalahan yang menyangkut keberadaan pedagang kaki lima kepada kecamatan masing-masing di seluruh wilayah Kota Semarang.

Melalui berbagai kebijakan dan khususnya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL maka Pemerintah Kota Semarang mencoba untuk menata kembali keberadaan PKL sesuai dengan iklim reformasi dengan melibatkan komunitas dan kelompok PKL tersebut. Tujuan dari diterbitkannya kebijakan Perda No. 11 Tahun 2000 dan Surat Keputusan Walikota Semarang No. 130.2/339 Tahun 2000 adalah untuk melaksanakan :

- a. Terjaminnya kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan wilayah kota dengan keterlibatan para pelaku kebijakan.
- b. Terjaminnya usaha masyarakat dalam usahanya sebagai pedagang kaki lima yang mempunyai perijinan secara resmi.
- c. Terjaminnya pemasukan dari retribusi PKL untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa retribusi sewa lahan.

Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) yang tertuang dalam Perda No. 11/2000 ini pelaksanaannya telah diserahkan langsung ke wilayah Kecamatan sebagai pembina dan Kelurahan sebagai pengawas melalui Keputusan Walikota Nomor 130.2/339 Tahun 2000 pada tanggal 5 Agustus 2000.

Pada dasarnya, Perda No. 11/2000 ini melarang pedagang kaki lima untuk merombak, menambah, mengubah fungsi, dan fasilitas lokasi pedagang kaki lima yang telah disediakan dan atau ditentukan oleh pemerintah kota, mendirikan bangunan secara permanen di lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan, memindah tangankan izin tempat usaha pedagang kaki lima kepada pihak lain, melakukan usaha di luar lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan, serta menempati lahan lokasi pedagang kaki lima untuk kegiatan tempat tinggal (hunian).

Namun demikian dalam kenyataannya semua ketentuan dan larangan yang ada di atas tidak dipatuhi oleh para pedagang kaki lima walaupun telah diupayakan adanya penegakan hukum dari aparat kecamatan dan kelurahan. Hal ini diakibatkan adanya beberapa indikator atau penyebab pelanggaran dan halangan Perda tersebut seperti (Suara Merdeka, 25 Maret 2002):

1. Adanya sikap permisif dan kurangnya pemahaman Perda No. 11/2000 dari sebagian besar masyarakat kota Semarang.
2. Adanya ketidak tegasan aparat dalam melaksanakan ketentuan Perda No. 11/2000.
3. Adanya tokoh masyarakat yang cukup disegani dalam memelopori pendirian bangunan untuk PKL di tempat yang bukan semestinya.
4. Adanya institusi seperti Universitas Diponegoro di sekitar wilayah kampus Pleburan yang memelopori pendirian bangunan PKL dengan

dampaknya yang agak mengkhawatirkan karena jumlah PKL semakin membengkak dan cenderung semakin menyebar.

5. Adanya ketakutan dari aparat untuk bertindak lebih jauh karena dampak reformasi justru membuat para PKL semakin mempunyai keberanian melawan aparat.

Dalam hal ini peranan Persatuan Pedagang dan Jasa (PPJ) Kota Semarang turut menentukan tujuan akhir dari kebijakan tersebut. Salah satu program pemberdayaan PKL yang melibatkan PPJ dengan sekitar 8.500 PKL anggotanya adalah melakukan penertiban secara mandiri. Berdasarkan keterangan dari PPJ dinyatakan bahwa mereka telah berusaha menertibkan anggotanya agar tidak menempati daerah larangan. Tetapi, kenyataan di lapangan tidak sedikit para pedagang yang bukan merupakan anggota Persatuan Pedagang dan Jasa (PPJ) Kota Semarang nekad menempati daerah larangan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah PKL tidak diimbangi dengan pertumbuhan tempat yang tidak memadai.

Sejalan dengan reformasi, perilaku dalam masyarakat khususnya di Kota Semarang mulai berubah. Euforia reformasi yang berlebihan membuat masyarakat lebih berani bertindak di luar aturan. Bahkan berbagai pelanggaran dilakukan secara terang-terangan, tanpa perasaan takut sewaktu-waktu ditindak. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan masa sebelum reformasi (Orde Baru). Pada masa itu Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) yang dikenal dengan nama Tibum (ketertiban umum menjadi sosok yang paling menakutkan bagi para pedagang kaki lima (Suara Merdeka, 17 April 2002).

Jika pada masa lalu dapat kita lihat bahwa tidak ada PKL yang berani membuka dasaran di sembarang tempat seperti di atas saluran air atau trotoar jalan protokol maka keadaannya kini dapat berolak belakang. Seiring dengan krisis ekonomi yang telah berlangsung sejak tahun 1997, kios-kios PKL kini

semakin menjamur di mana-mana. Dalam waktu singkat jumlah PKL semakin bertambah dan menambah kekhawatiran akan adanya puncak permasalahan PKL seperti di kota-kota besar di Jakarta dan Bandung yang berakhir dengan konflik mengesankan (Kompas, April 2002).

Ketiadaan pemahaman aturan seperti peraturan-peraturan daerah yang sudah usang yang ditetapkan oleh eksekutif dan legislatif (DPRD) seringkali hanya menjadi perangkat hukum yang hanya dipahami oleh segelintir khalayak masyarakat dengan semakin meningkatnya pelanggaran dan berbagai konflik lainnya (Suara Merdeka, 17 April 2002).

Dengan melihat kondisi yang ada, maka apabila subyek tidak ditangani secara sistematis akan mengakibatkan beberapa permasalahan dan konflik yang berkaitan dengan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kelestarian lingkungan Lingkungan Kota. Berdasarkan permasalahan tersebut maka Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Kebijakan pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) melalui Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000 ini dikeluarkan seiring dengan melihat latar belakang secara umum kondisi nasional Indonesia yang tidak begitu baik dan kondisi kota Semarang pada khususnya. Melalui Perda tersebut maka strategi pembangunan daerah kota Semarang yang dilakukan berdasar pada konsep Tri Bina yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan dapat diimplementasikan dengan baik. Konsep pembangunan ini merupakan konsep yang mengamodasikan tiga komponen yang saling melengkapi dan saling berkaitan satu dengan lainnya, antara manusia selaku pelaku pembangunan, dunia usaha sebagai obyek dalam proses pembangunan dan lingkungan sebagai faktor yang melingkupi pembangunan secara berkesinambungan. Dengan demikian melalui Perda tersebut tujuan dari kebijakan Pemerintah Kota

Semarang yang berdasar pada Tri Bina Pembangunan ini dapat memecahkan dan menangani permasalahan PKL di Kecamatan Semarang Tengah.

Untuk mengimplementasikan konsep pembangunan tersebut, maka strategi yang dilaksanakan dalam pembangunan daerah adalah strategi yang berdasarkan pada pendekatan seperti :

1. Integratif

Pendekatan ini mengandung makna :

- a. Pembangunan kota Semarang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pembangunan daerah Propinsi dan Pembangunan Nasional, sehingga dalam pelaksanaan senantiasa masih mengacu pada pola pembangunan propinsi dan Pembangunan nasional yang telah ditetapkan.
- b. Pembangunan kota Semarang pada prinsipnya merupakan serangkaian proses yang terdiri dari berbagai unsur yang sangat luas, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan adanya keserasian hubungan antar unit organisasi, antar sektor, dan antar wilayah.
- c. Pembangunan daerah tidak terlepas dari kerjasama dengan daerah lain disekitarnya, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya tidak dapat mengabaikan hubungan kerjasama dengan daerah-daerah disekitarnya.

2. Pemberdayaan

Pendekatan ini mengandung esensi bahwa pembangunan pada dasarnya adalah pengembangan dari masyarakat itu sendiri, masyarakat harus menjadi subyek pembangunan, oleh sebab itu masyarakat selaku subyek pembangunan dituntut agar dapat

berperan aktif dalam proses pembangunan itu. Dengan demikian masyarakat harus memiliki kemampuan, semangat dan prakarsa yang muncul dalam dirinya sendiri.

Strategi yang relevan dalam mengaktualisasikan hal tersebut adalah dengan pemberdayaan masyarakat semaksimal mungkin.

3. Penetapan Skala Prioritas

Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan pada upaya pemecahan masalah-masalah yang sangat urgen bagi kepentingan masyarakat luas. Pembangunan harus senantiasa disesuaikan dengan prioritas masalah yang dihadapi, oleh karena itu dalam mengimplementasikan penentuan sektor-sektor pembangunan juga berdasarkan pada skala prioritas tersebut, dengan harapan pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Dengan demikian, melalui konsep pembangunan tersebut Pemerintah Kota Semarang bermaksud mengatur dan menertibkan para PKL agar kehadiran mereka dapat memberikan manfaat bagi kehidupan warga kota dengan menghindarkan seminimal mungkin timbulnya berbagai segi dan dampak negatif berupa permasalahan PKL di kota Semarang.

Permasalahan pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Semarang Tengah berkaitan dengan adanya permasalahan yang dapat potensial mengganggu pada masa yang akan datang terutama dalam beberapa hal seperti :

1. Kebersihan

Sebagian besar Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam jumlah yang tidak begitu banyak sudah seharusnya masih mampu untuk mengendalikan kebersihan lingkungannya dengan fasilitas kebersihan yang disediakan oleh pemerintah kota. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah PKL di sudut kota tertentu

mengakibatkan sarana dan prasarana kebersihan yang ada tidak mampu untuk menampung sampah dari semua hasil aktivitas PKL yang ada. Sementara potensi aktivitas lainnya yang tidak dapat terkontrol secara ketat dari pedagang kaki lima adalah seringnya para pengunjung pedagang kaki lima tidak mengindahkan kebersihan sebagai akibat meluapnya jumlah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan mereka.

2. Keindahan

Menurut pendapat dari sebagian kalangan akademisi di UNDIP, mahasiswa UNDIP, masyarakat, tokoh elit masyarakat, dan dari sebagian PKL sendiri menyatakan bahwa keberadaan PKL yang tidak terkontrol mengancam keindahan estetika kota Semarang (Suara Merdeka, 17 April 2002). Keberadaan pedagang kaki lima yang mengambil tempat strategis sering membuat keindahan kota menjadi terganggu. Hal ini tercermin dari sebagian besar kegiatan pedagang kaki lima yang mengambil tempat atau lokasi untuk mendirikan bangunan baik semi permanen maupun permanen dalam melakukan kegiatan mereka pada tempat-tempat yang dilarang namun dirasa sangat strategis bagi kegiatan mereka. Sementara itu modal sebagian besar para PKL yang pas-pasan juga membuat semua bentuk dasaran atau bangunan PKL tampak sangat kumuh dan kotor.

3. Ketertiban

Dalam data kegiatan operasi Yustisi Kantor Satpol PP Kota Semarang Tahun 2001 dinyatakan bahwa operasi yang menyangkut ketertiban PKL pada tahun 2001 dilakukan sebanyak 98 kali dari tujuh jenis operasi lainnya dari total 535 operasi Yustisi yang ada. Salah satu indikator kegiatan pedagang kaki lima di wilayah kota Semarang yang

mengganggu ketertiban adalah kegiatan mereka yang mengambil tempat di trotoar dan pinggir jalan sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas dan para pejalan kaki yang menggunakan fasilitas trotoar dimana hal ini juga melanggar SK Walikota No. 511.3/16 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Kaki Lima.

4. Keamanan

Kegiatan para pedagang kaki lima mengundang adanya kegiatan premanisme dan pungutan liar dari lingkungan sekitarnya sehingga dapat menimbulkan berbagai eksekusi negatif seperti adanya jual beli lahan dan perebutan lahan antar PKL sendiri (Suara Merdeka, 17 April 2002). Di lain pihak, operasi penertiban PKL seperti yang terjadi di kota-kota besar lain seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya seringkali menimbulkan kerawanan keamanan dengan akhir seperti konflik antara PKL dengan aparat, masyarakat dengan aparat, masyarakat dengan masyarakat lainnya bahkan antar aparat saling bertentangan (Kompas, 20 Maret 2002)

5. Kelestarian Lingkungan Kota.

Berbagai aktivitas PKL terutama dari PKL jenis usaha makanan dan minuman sangat rentan terhadap penyebaran berbagai macam penyakit karena kotoran dan limbah yang dihasilkan dibuang pada tempat yang tidak memadai dan memenuhi syarat. Terlebih lagi para PKL yang menempati lahan di atas saluran air sering tidak dapat dikontrol lagi oleh petugas sehingga menyebabkan saluran air menjadi tersumbat dan mengakibatkan banjir di musim hujan akibat dari tingginya jumlah sampah yang dibuang ke saluran air dan daya tampung tempat sampah yang ada di sekitarnya terbatas.

Beberapa kasus seperti penyalahgunaan lahan dan penyerobotan ruang publik seperti menyita sebagian trotoar bagi pejalan kaki serta menempati lahan-lahan yang dirasa kosong sempat menimbulkan konflik yang menjurus kekekerasan. Sementara kasus lainnya adalah pendirian bangunan untuk lokasi usaha PKL di tempat terlarang dan tidak mengindahkan aspek lingkungan sekitarnya dengan mendirikan bangunan permanen secara liar. Hal ini juga sangat merugikan lingkungan kota, sebagai contoh pembangunan kios-kios PKL di atas saluran air pada suatu waktu akan menjadi bencana dengan tidak terkontrolnya saluran air akibat tertutupnya saluran tersebut dengan lantai bangunan PKL. Dengan demikian, tidak efektifnya Perda No. 11/2000 akan berdampak negatif pada masalah kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, dan kelestarian lingkungan kota. Oleh karena itu setelah melihat latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai perilaku pedagang kaki lima di kota Semarang terhadap Perda No. 11/2000 guna mencari alternatif dan solusi kebijakan dan perda dalam mengatasi sektor informal pedagang kaki lima untuk menambah wawasan dalam konteks kebijakan publik di kota Semarang.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Penelitian ini dilakukan setelah mengetahui adanya beberapa hambatan dan permasalahan negatif yang menyangkut perilaku PKL terhadap Perda No.11/2000 di kota Semarang dalam hal :

1. Adanya sikap dan perilaku permisif dan kurangnya pemahaman Perda No.11/2000 dari sebagian besar masyarakat kota Semarang.
2. Adanya ketidak tegasan aparat dalam melaksanakan ketentuan Perda No. 11/2000 membuat perilaku PKL terhadap peraturan menjadi apatis.

3. Adanya perilaku dari tokoh masyarakat yang cukup disegani dalam memelopori pendirian bangunan untuk PKL di tempat yang bukan semestinya sehingga menyulitkan implementasi Perda No. 11/2000.
4. Adanya indikasi institusi seperti Universitas Diponegoro di sekitar wilayah kampus maupun instansi lainnya yang memelopori pendirian bangunan PKL dengan dampaknya yang agak mengkhawatirkan sehingga jumlah PKL semakin membengkak dan cenderung semakin menyebar. Hal ini juga mempengaruhi perilaku PKL.
5. Adanya penurunan kualitas kota dalam hal : kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, dan kelestarian lingkungan kota Semarang semakin mempengaruhi perilaku PKL untuk melanggar perda.

C. PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan mengenai Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku PKL Terhadap Perda No. 11/2000 di Kecamatan Semarang Tengah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah karakteristik PKL di Kecamatan Semarang Tengah berpengaruh signifikan terhadap perilaku PKL?
2. Apakah pemahaman Perda Pemerintah Kota Semarang No. 11/2000 berpengaruh signifikan terhadap perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah ?
3. Apakah karakteristik lingkungan PKL di Kecamatan Semarang Tengah berpengaruh signifikan terhadap perilaku PKL ?
4. Apakah karakteristik PKL, Pemahaman Perda No.11/2000, dan Karakteristik Lingkungan PKL mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah ?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. TUJUAN TEORITIS

- a. Untuk mengembangkan teori dan kajian mengenai kebijakan yang ada guna menambah wawasan akademik.
- b. Untuk mengetahui hubungan antar variabel dengan menganalisis secara ilmiah hubungan yang terdapat pada variabel pengaruh dan variabel terpengaruh.

2. TUJUAN PRAKTIS

Tujuan praktis dari penelitian adalah untuk memecahkan permasalahan mengenai perilaku PKL dalam penerapan kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL melalui Perda No. 11/2000 Pemerintah Kota Semarang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti karakteristik PKL, pemahaman perda, dan karakteristik lingkungan PKL di Kecamatan Semarang Tengah.

3. TUJUAN UMUM

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji, maka secara umum tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah karakteristik PKL di Kecamatan Semarang Tengah berpengaruh signifikan terhadap perilaku PKL.
2. Untuk mengetahui apakah pemahaman Perda Pemerintah Kota Semarang No. 11/2000 berpengaruh signifikan terhadap perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah ?
3. Untuk mengetahui apakah karakteristik lingkungan PKL di Kecamatan Semarang Tengah berpengaruh signifikan terhadap perilaku PKL.
4. Untuk mengetahui apakah karakteristik PKL, Pemahaman terhadap Perda No. 11/2000, dan Karakteristik Lingkungan PKL mempunyai

pengaruh signifikan terhadap perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah.

4. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian adalah untuk menganalisis keadaan dari, alasan, untuk, dan konsekuensi kebijakan terhadap suatu set keadaan khusus. Keadaan tersebut dapat dilakukan melalui observasi dan analisis. Penelitian ini memegang peranan penting dalam memberikan landasan terhadap tindakan serta keputusan kebijakan perda dalam aspek pembangunan yang melibatkan keberadaan rakyat khususnya pedagang kaki lima (PKL) di wilayah kota Semarang.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN PENELITIAN

Untuk memberikan gambaran isi penelitian secara keseluruhan maka disajikan sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

- **Bab I. Pendahuluan.**

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan penelitian.

- **Bab II. Telaah Pustaka dan Pengembangan Model Penelitian**

Bab ini berisi uraian tentang pengertian perilaku, pengertian PKL, perilaku PKL, karakteristik PKL, pemahaman kebijakan Perda No. 11/2000, analisis kebijakan, elemen kebijakan, kerangka analisis kebijakan, karakteristik lingkungan PKL dan hipotesis.

- **Bab III. Metode Penelitian**

Bab ini berisi desain penelitian, ruang lingkup penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, populasi dan

teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal penelitian.

- Bab IV. Analisis Data

Bab ini berisi pemaparan tentang gambaran umum obyek penelitian, proses dan hasil analisis data serta pembahasan hasil penelitian.

- Bab V. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan hipotesis dan masalah penelitian, implikasi pada teori-teori manajemen, implikasi pada kebijakan manajemen, keterbatasan penelitian dan agenda untuk penelitian mendatang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

2.1. PERILAKU PKL (VARIABEL Y)

Pengertian perilaku dalam konteks kebijakan adalah perilaku individu dalam lingkungan kebijakan. Perilaku dalam lingkungan kebijakan pada hakekatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu-individu pelaku kebijakan dalam lingkungan (organisasinya) (Thoha, 2000). Masing-masing individu tersebut membawa karakteristik yang berbeda-beda dalam lingkungan organisasinya sehingga membawa pengaruh ke lingkungan organisasinya (Gibson, 1996). Namun apabila lingkungan atau organisasi dari masing-masing individu tersebut mempunyai karakteristik berupa keteraturan yang diwujudkan dalam bentuk seperti peraturan, tanggung jawab, hak dan kewajiban maka karakteristik lingkungan atau organisasi tersebut akan berinteraksi dengan perilaku masing-masing individu (Thoha, 2000). Dalam penelitian ini maka unit analisisnya adalah perilaku masing-masing PKL.

Perilaku PKL terhadap Perda No. 11/2000 merupakan suatu tolok ukur keberhasilan dari kebijakan Perda tersebut. Dengan mengetahui perilaku PKL tersebut maka diharapkan dapat mengatasi permasalahan pokok PKL di perkotaan yang dapat dijadikan tolok ukur dalam menentukan keberhasilan dari kebijakan pemerintah kota di Kecamatan Semarang Tengah. Adapun permasalahan yang dapat menjadi tolok ukur perilaku pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Semarang Tengah berkaitan dengan permasalahan yang mengganggu terutama dalam hal :

1. Kebersihan

Potensi aktivitas dari pedagang kaki lima menimbulkan permasalahan kebersihan dimana seringkali para pedagang kaki lima tidak mengindahkan kebersihan sebagai akibat meluapnya jumlah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan mereka.

2. Keindahan

Keberadaan pedagang kaki lima yang mengambil tempat strategis sering membuat keindahan kota menjadi terganggu. Hal ini tercermin dari kegiatan pedagang kaki lima yang mengambil tempat atau lokasi untuk melakukan kegiatan mereka pada tempat-tempat yang dilarang namun dirasa sangat strategis bagi kegiatan mereka.

3. Ketertiban

Salah satu indikator kegiatan pedagang kaki lima di wilayah kota Semarang yang mengganggu ketertiban adalah kegiatan mereka yang mengambil tempat di trotoar dan pinggir jalan sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas dan para pejalan kaki yang menggunakan fasilitas trotoar.

4. Keamanan

Kegiatan para pedagang kaki lima mengundang adanya kegiatan premanisme dan pungutan liar dari lingkungan sekitarnya sehingga dapat menimbulkan berbagai eksekusi negatif seperti adanya jual beli lahan dan perebutan lahan antar PKL sendiri.

5. Kelestarian Lingkungan Kota.

Keberadaan kios-kios PKL di sebagian besar kota-kota di Indonesia pada umumnya dan di Kota Semarang pada khususnya, tampak bahwa bangunan-bangunan semi permanen, permanen, dasaran untuk berjualan, lapak-lapak PKL, serta berbagai jenis sarana untuk

berdagang di kaki lima menunjukkan kecenderungan tidak ramah terhadap kelestarian lingkungan disekitarnya (Kompas, 1 Februari 2002).

Sebagai contoh, aktivitas PKL terutama dari PKL jenis usaha makanan dan minuman sangat rentan dengan kelebihan limbah yang dibuang. Hal ini karena sisa makanan dan limbah yang dihasilkan dibuang pada tempat yang tidak memadai dan memenuhi syarat sebagai akibat sarana kebersihan yang ada tidak atau kurang memadai.

Dengan melihat kelima indikator diatas maka apabila hal-hal tersebut sebagian besar menunjukkan perilaku PKL yang tidak mendukung terhadap keberhasilan Perda No.11/2000 maka dapat dikatakan bahwa Perda No. 11/2000 tersebut perlu ditinjau kembali. Demikian pula jika sebaliknya maka perlu dievaluasi apakah perlu dikembangkan atau tidak. Hal ini berkaitan dengan pendapat yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dalam penanganan suatu masalah (PKL) dipengaruhi oleh suatu asumsi yang menyatakan bahwa :

Jika sebuah kebijaksanaan tidak tepat dalam arti tidak dapat memecahkan masalah untuk mana kebijaksanaan tersebut telah dirancang maka hal tersebut merupakan suatu kegagalan, tidak peduli seberapa baiknya kebijakan dan kebijaksanaan itu telah dilaksanakan. Namun sebaliknya suatu kebijakan yang cemerlang dilaksanakan dengan buruk akan gagal mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Edward, 1980).

Menurut *Grindle* (1980) menjelaskan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi aktivitas penerapan kebijakan yaitu content dan context dari kebijakan.

Konten (content) kebijakan terdiri dari :

- a. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi.
- b. Jenis dan manfaat yang dapat diperoleh
- c. Jangkauan perubahan yang dapat diharapkan
- d. Kedudukan pengambilan keputusan
- e. Pelaksana-pelaksana program
- f. Sumber-sumber yang tersedia.

Sedangkan konteks (*context*) kebijakan memiliki dasar yaitu :

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari mereka yang terlibat dalam penerapan kebijakan.

Adanya kepentingan dan strategi dari pihak eksekutif, legislatif, dan golongan masyarakat dari berbagai pihak seringkali menimbulkan konflik dan mempengaruhi perilaku PKL dalam hal ketertiban dan keamanan.

- b. Karakteristik rezim (walikota) dan lembaga (DPRD, birokrasi pemerintah) akan mempengaruhi tindakan dan perilaku PKL dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, kewajiban retribusi, keamanan, dan kelestarian lingkungan kota.

- c. Kesadaran dan ketanggapan.

Kesadaran dan ketanggapan dari pengambil keputusan dalam menangani dampak yang ada dari suatu kebijakan seperti Perda No.11/2000 memiliki pengaruh terhadap perilaku PKL dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, kewajiban retribusi, keamanan, dan kelestarian lingkungan kota.

Ada beberapa hal mengapa setiap anggota masyarakat mau dan tidak mau serta berperilaku positif dalam melaksanakan kebijaksanaan yaitu :

- a. Kebijakan akan dilaksanakan jika :
1. Adanya kepentingan pribadi, rezim atau lembaga yang mendasari tindakan atau perilaku PKL.
 2. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan pemerintah.
 3. Adanya kesadaran untuk menerima kebijaksanaan dapat terlaksana jika perilaku PKL cenderung mendukung Perda No.11/2000.
 4. Adanya keyakinan bahwa kebijaksanaan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang benar akan menambah aspek positif terhadap perilaku PKL.
 5. Adanya hukuman dan sanksi tertentu bila tidak melaksanakan kebijaksanaan akan membawa perilaku PKL yang positif..
 6. Terkait dengan masalah waktu dimana adanya suatu konflik yang berkepanjangan akan berhubungan dengan perilaku PKL.
- b. Kebijakan tidak akan dilaksanakan dan membawa pengaruh kepada perilaku PKL yang tidak menunjang keberhasilan Perda apabila:
1. Bertentangan dengan sistem nilai masyarakat.
 2. Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum.
 3. Keanggotaan seseorang dalam suatu perkumpulan atau kelompok.
 4. Keinginan untuk mencari untung dengan cepat.
 5. Adanya ketidak pastian hukum. (Islamy, 2001: 108-111).

2.2. KARAKTERISTIK PKL (VARIABEL X1)

Pengertian sektor informal dalam konteks pedagang kaki lima adalah suatu unit usaha yang tidak memperoleh berbagai proteksi ekonomi dari pemerintah dan sektor yang belum mempergunakan bantuan atau fasilitas dari

pemerintah meskipun bantuan itu telah tersedia. Karakteristik sektor informal ini menurut ILO/International Labour Organization (Widodo, 2000) yaitu : mudah dimasuki, bersandar pada sumber daya disekitarnya, merupakan kegiatan usaha keluarga, ukuran usaha dalam skala kecil, bersifat intensif kerja dan dengan teknologi tepat guna, ketrampilan bukan berskala dari sekolah formal, diluar jalur pemerintah, dan bergerak dalam pasar sangat bersaing.

Latar belakang profesi PKL ini disebabkan oleh adanya kecenderungan para PKL yang menjadikan PKL sebagai mata pencaharian pokok sehari-hari di kota-kota besar. Selain itu juga dilatar belakang oleh adanya pengaruh faktor sosial dan ekonomi yang mendorong para PKL untuk melakukan usahanya. Dengan pengaruh sosial ekonomi perkotaan yang membutuhkan adanya PKL maka profesi sebagai PKL merupakan daya tarik bagi kehidupan pencari kerja di perkotaan.

Sementara itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (Widodo, 2000: 26) menyatakan bahwa ciri-ciri sektor informal dapat dijelaskan seperti berikut :

- a. Pada umumnya barang-barang dan jasa yang dijual harganya lebih murah dan terjangkau oleh sebagian masyarakat.
- b. Modal dan perputaran usaha relatif tidak begitu besar.
- c. Sumber dan modal usaha umumnya berasal dari modal sendiri atau dari keluarga dan kerabat.
- d. Kegiatan usaha yang tidak terorganisir secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal.
- e. Pada umumnya sebagian besar tidak mempunyai izin.
- f. Pola kegiatan usaha tidak teratur dalam arti tidak ada hal-hal formal.

g. Banyak dari program pemerintah seperti pemberian bantuan dana untuk sektor informal terhalang oleh hal-hal non teknis dan sikap dari penerima program sendiri.

Dengan melihat karakteristik diatas maka, pedagang kaki lima dapat digolongkan dalam sektor informal karena memiliki sebagian besar dari karakteristik tersebut. Dilihat dari keberadaanya, sektor informal dapat berada di daerah kota maupun desa, namun khusus di daerah pedesaan sektor informal di pedesaan masih sangat tradisional sehingga disebut dengan sektor tradisional karena nyaris tidak mendapatkan profit dan lebih bersifat sosial. (Widodo, 2000:24).

PKL adalah sebagai salah satu bentuk kegiatan usaha di sektor informal. Pada dasarnya pedagang kaki lima (PKL) adalah sebagai kegiatan seorang individu atau kelompok yang melakukan usaha perdagangan atau jasa yang dilakukan di tempat-tempat umum dengan legalitas formal yang tidak begitu tinggi serta cenderung untuk berpindah-pindah tempat. Istilah kaki lima pada mulanya berasal dari ukuran trotoar di pinggir jalan dengan lebar sepanjang lima kaki (1,5 meter) sehingga dalam pengertian ini PKL adalah pedagang yang berjualan pada kaki lima dengan mengambil tempat atau lokasi di daerah keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan, pasar, kantor, sekolah, gedung bioskop, alun-alun, dan bahkan di kawasan perumahan tempat tinggal (Chandrakirana, dkk, 1995).

Dilihat dari klasifikasinya, pedagang kaki lima di kota Semarang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis klasifikasi seperti :

a. Klasifikasi menurut sifat lokasi usaha :

1. Permanen.
2. Semi permanen.
3. Tidak permanen (berkeliling).

b. Berdasar pada status lokasi usaha :

1. Mempunyai izin.
2. Tidak mempunyai izin.

c. Berdasar pada jenis barang atau jasa :

1. Usaha Jasa (menjual jasa, seperti layanan memperbaiki barang rusak).
2. Usaha Non Jasa (menjual barang, makanan, dan binatang hidup).

d. Berdasar waktu usaha PKL :

1. Siang Hari.
2. Malam Hari.
3. Sepanjang hari.
4. Musiman.

Karakteristik pedagang kaki lima di wilayah kota Semarang dapat diidentifikasi dengan indikator kondisi PKL tersebut dengan masukan data meliputi waktu usaha, pekerjaan tetap, pengembangan usaha, modal usaha, pendidikan, harga, lama usaha, jenis kelamin, usia dan lokasi usaha dari PKL terhadap kebijakan Perda No. 11/2000 Pemerintah Kota Semarang.

Selain beberapa hal diatas maka karakteristik PKL menurut Julissar Annaf (Widodo, 2000: 31) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagi PKL, berdagang di kaki lima merupakan mata pencaharian pokok.
2. Sebagian besar PKL termasuk golongan angkatan kerja yang produktif.
3. Tingkat pendidikan PKL umumnya rendah.
4. Sebagian besar PKL merupakan pendatang walaupun telah mempunyai KTP kota yang bersangkutan.

5. Sebelum menjadi PKL, umumnya pernah bekerja di tempat lain dengan hasil yang tidak memuaskan.
6. Modal cukup lemah dengan omzet penjualan relatif tidak begitu besar.
7. Modal berasal dari diri sendiri, keluarga atau kerabat.
8. Kurang mampu dan sedikit kemauan untuk memupuk modal.
9. Sebagian besar PKL terkena pungutan resmi ataupun tidak resmi (pungli) dari petugas, oknum petugas maupun dari para preman.
10. Tingkat pendapatan relatif rendah untuk ukuran kota besar.
11. Barang dan jasa yang dijual cukup terjangkau.
12. Barang dan jasa yang dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga kota yang sewaktu-waktu membutuhkan.

2.3. PEMHAMAMAN KEBIJAKAN PERDA NO. 11/2000 (VARIABEL X2)

Dalam memahami makna pemahaman suatu kebijakan, maka terlebih dahulu perlu memahami secara teoritis dari analisis kebijakan. Teori merupakan sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis dalam gejala sosial maupun natura yang ingin diteliti. Teori merupakan abstraksi dari pengertian atau hubungan dari proporsi atau dalil. Menurut Kerlinger (Nazir, 1988) teori adalah sebuah set konsep atau *construct* yang berhubungan satu dengan lainnya, suatu set dari proporsi yang mengandung suatu pandangan sistematis dari fenomena. Teori adalah alat dari ilmu (*tool of science*). Di lain pihak teori juga merupakan alat penolong teori. Sebagai alat dari ilmu, teori mempunyai peranan sebagai berikut :

- a. Teori mendefinisikan orientasi utama dari ilmu dengan cara memberikan definisi terhadap jenis-jenis data yang akan dibuat abstraksinya.

- b. Teori memberikan rencana (*scheme*) konseptual, dengan rencana mana fenomena-fenomena yang relevan disistematikan, diklasifikasikan dan dihubungkan-hubungkan.
- c. Teori memberikan ringkasan terhadap fakta dalam bentuk generalisasi empiris dan sistem generalisasi.
- d. Teori memberikan prediksi terhadap fakta.
- e. Teori memperjelas celah-celah di dalam pengetahuan kita.

Penelitian dan teori mempunyai hubungan yang sangat erat. Teori memberikan dukungan kepada penelitian dan di lain pihak, penelitian juga memberikan kontribusi kepada teori. Teori dapat memandu penelitian sehingga penelitian yang dilakukan memberikan hasil yang diharapkan. Teori dapat merangkum penemuan-penemuan khas dari berbagai studi dan teori dapat menyediakan basis untuk suatu penjelasan atau prediksi oleh suatu teori.

Secara teoritis, menurut William N. Dunn (2000), analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik. Pengetahuan tersebut betapapun tetap tidak lengkap kecuali jika hal tersebut disediakan kepada pengambil kebijakan dan publik terhadap siapa para analis berkewajiban melayaninya. Hanya jika pengetahuan tentang kebijakan dikaitkan dengan pengetahuan dalam proses kebijakan, anggota-anggota badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bersama dengan warga negara yang memiliki peranan dalam keputusan-keputusan publik, dapat menggunakan hasil-hasil analisis kebijakan untuk memperbaiki proses pembuatan kebijakan tergantung pada akses terhadap kebutuhan pengetahuan yang tersedia, komunikasi dan penggunaan analisis kebijakan menjadi penting sekali dalam praktek dan teori pembuatan kebijakan publik.

Deskripsi analisis kebijakan yang diberikan oleh E.S. Quade (Dunn dalam Darwin, 2000) adalah sebagai berikut :

"Analisis kebijakan adalah setiap jenis analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi dapat menjadi dasar bagi para pengambil kebijakan di dalam menguji pendapat-pendapat mereka. Dalam analisis kebijakan kata analisis digunakan dalam pengertian yang paling umum. Kata tersebut secara tidak langsung menunjukkan penggunaan institusi dan pertimbangan yang mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dengan pemecahan ke komponen-komponennya, tetapi juga merencanakan dan mencari sintesis (pengganti) atas alternatif-alternatif baru. Aktivitas-aktivitas itu meliputi penelitian untuk menjelaskan atau memberikan wawasan terhadap problem atau isu yang mendahului atau untuk mengevaluasi program yang sudah selesai. Beberapa analisis bersifat informal yang tidak lebih hanya berupa pemikiran keras dan teliti, sedangkan lainnya memerlukan data yang luas sehingga dapat dihitung dengan proses matematika yang rumit."

Tujuan analisis kebijakan lebih dari sekedar menghasilkan fakta-fakta, dimana disini juga dicari cara untuk menghasilkan informasi mengenai nilai-nilai dan arah tindakan yang lebih baik. Dengan demikian analisis kebijakan meliputi evaluasi kebijakan dan rekomendasinya (*policy advocacy*).

Kajian teoritis mengenai kebijakan pada dasarnya untuk mengkaji dan mengidentifikasi masalah sehingga dapat dipahami secara ilmiah. Hal ini diperlukan guna menetapkan pemahaman secara teoritis sesuai dengan topik penelitian yang dibahas guna menetapkan kerangka pikir dan kesimpulan secara ilmiah.

Menurut pendapat Dr. M Irfan Islamy dalam bukunya yang berjudul Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara dikatakan bahwa kebijakan

atau kebijaksanaan (pengejawantahan kebijakan) (*policy*) seperti juga dikatakan oleh Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dapat diartikan :

"a projected program goals, values and practises" (suatu kegiatan pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah). Sementara itu Thomas R. Dye (Syafie, 1997: 106) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendingkan) sesuatu itu (*whatever government choose do or not to do*). Sedangkan menurut pendapat *RC. Chandler* dan *JC. Plano*, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik. Pendapat dari *A. Hoogerwerf* menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai unsur penting dari politik, dapat diartikan sebagai usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu. Menurut *Anderson*, Kebijaksanaan publik adalah hubungan antar unit-unit pemerintah dengan lingkungannya. *Arnold Rose* menyatakan, kebijaksanaan publik adalah serangkaian tindakan yang saling berkaitan (dalam pemerintahan). Sedangkan di lain pihak seperti dari pernyataan *William N. Dunn*, kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Pendapat terakhir dari *Carl Fiedrick* menyatakan, kebijaksanaan pemerintah ini merupakan suatu usulan tindakan oleh seseorang, keluarga atau pemerintah pada suatu lingkungan politik tertentu, mengenai hambatan dan peluang yang dapat diatasi, dimanfaatkan oleh suatu kebijaksanaan, dalam mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu maksud.

Pada akhirnya dapat dirumuskan bahwa pengetahuan teoritis tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan dan program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijaksanaan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat umum yang berguna dalam perumusan kebijakan serta dapat meningkatkan kinerja kebijaksanaan (Sofyan Effendi, Syafie, 1997: 107). Dengan demikian kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Perda No. 11/2000 merupakan suatu kegiatan pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah dengan orientasi pada pembinaan PKL guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka dan masyarakat kota Semarang pada umumnya. Melalui terminologi tersebut maka suatu kebijakan dengan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah kota bertujuan untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat seperti persoalan PKL guna dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan seperti perda, keputusan walikota, dan keputusan-keputusan dari pihak yang berwenang lainnya dalam wilayah kota yang bersangkutan.

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Semarang merupakan suatu petunjuk atau pedoman dimana pelaksanaannya dijabarkan dalam bentuk program pelaksanaan sehingga diharapkan dapat dipahami baik dari para pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan (masyarakat umum).

Tujuan dari diterbitkannya kebijakan Perda Nomor 11 Tahun 2000 dengan Surat Keputusan Walikota Semarang No. 130.2/339 Tahun 2000 pada prinsipnya untuk melaksanakan :

- a. Terjaminnya kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan wilayah kota dengan keterlibatan para pelaku kebijakan.

- b. Terjaminnya usaha masyarakat dalam usahanya sebagai pedagang kaki lima yang mempunyai perijinan secara resmi.
- c. Terjaminnya pemasukan dari retribusi PKL untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa retribusi sewa lahan.

2.3.1. METODOLOGI ANALISIS KEBIJAKAN

Metodologi analisis kebijakan seperti dikemukakan oleh Dunn (2000) diambil dari dan memadukan elemen-elemen dari berbagai disiplin seperti ilmu politik, sosiologi, psikologi, ekonomi, dan filsafat. Analisis kebijakan sebagian bersifat deskriptif, diambil dari disiplin-disiplin tradisional (misalnya ilmu politik) yang mencari pengetahuan tentang sebab dan akibat dari kebijakan-kebijakan publik. Namun analisis kebijakan juga bersifat normatif. Tujuan lainnya adalah menciptakan dan melakukan kritik terhadap klaim pengetahuan tentang nilai kebijakan publik untuk generasi masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Aspek normatif, atau kritik nilai, dari analisis kebijakan ini terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan kebijakan mencakup dinamika antara variabel tergantung (tujuan) dan variabel bebas (cara) yang sifatnya valuatif. Dengan demikian pilihan tentang variabel-variabel seringkali merupakan pemilihan terhadap nilai-nilai yang saling bersaing seperti keamanan, keadilan, kebebasan, ketertiban, pemerataan, dan kebebasan. Memilih dan menentukan prioritas satu nilai di atas nilai-nilai lainnya bukanlah penentuan yang bersifat teknis semata, tetapi juga keputusan yang memerlukan penalaran yang bersifat moral. Dengan demikian analisis kebijakan merupakan bentuk dari etika terapan. Di lain pihak analisis kebijakan berupaya menciptakan pengetahuan yang dapat meningkatkan efisiensi pilihan atas berbagai alternatif kebijakan. Dari penjelasan tersebut maka metodologi analisis kebijakan bertujuan menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang

relevan dengan kebijakan. Dalam hal ini pengetahuan menunjuk pada kepercayaan tentang sesuatu yang secara akal sehat dapat dibenarkan, yang berbeda dengan kepercayaan tentang kebenaran yang pasti, atau juga kebenaran dengan probabilitas statistik tertentu. Kompleksitas proses pembentukan dan implementasi kebijakan memberi jaminan bahwa kondisi yang perlu dan memadai untuk timbulnya kepastian tentang klaim dari kebijakan sangat jarang terjadi.

2.3.2. PROSEDUR ANALISIS KEBIJAKAN

Prosedur merupakan subordinat dari standar kejelasan dan relevansi kebijakan serta tuntutan umum dan kritik dari masyarakat. Dengan demikian peranan prosedur adalah untuk menghasilkan informasi mengenai masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan.

Dalam metodologi analisis kebijakan terdapat lima gabungan prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia (Dunn, 2000) yaitu :

a. Perumusan Masalah (Definisi)

Menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.

b. Peramalan (Prediksi)

Menyediakan informasi mengenai konsekuensi dimasa yang akan datang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk didalamnya dengan tidak melakukan hal sesuatu apapun.

c. Rekomendasi (Preskripsi)

Menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa yang akan datang dari suatu pemecahan masalah.

d. Pemantauan (Deskripsi)

Menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan.

e. Evaluasi

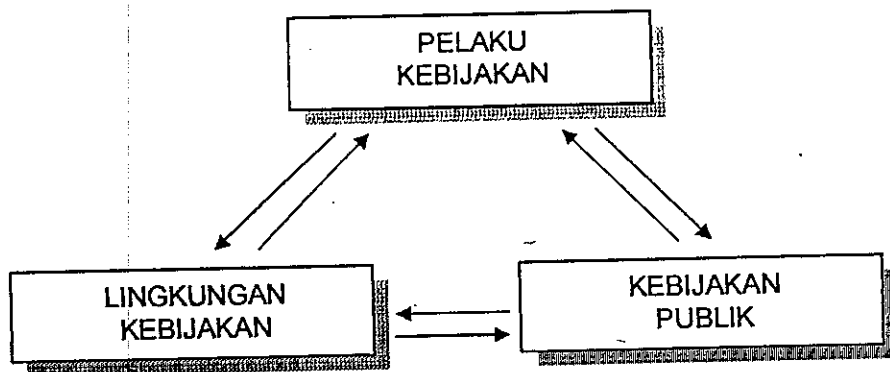
Menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau penanganan masalah yang diatasi.

2.3.3. ELEMEN KEBIJAKAN

Masalah kebijakan (*Policy Problems*) adalah nilai, kebutuhan, dan kesempatan yang belum terpenuhi, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan publik. Pengetahuan mengenai problem apa yang hendak dipecahkan memerlukan informasi mengenai kondisi-kondisi yang mendahului adanya problem (masalah) maupun informasi mengenai nilai yang pencapaiannya menuntun kepada pemecahan masalah. Penyediaan informasi mengenai masalah kebijakan merupakan suatu tugas yang penting dan paling sulit dalam analisis kebijakan. Hal ini disebabkan oleh problem (masalah) yang dipecahkan akan menentukan kemampuan kita menemukan dan mengidentifikasi pemecahan yang sesuai. Kekurangan atau kesalahan informasi pada tahap analisis ini dapat menimbulkan kesalahan fatal, merumuskan secara salah yang seharusnya dirumuskan secara benar.

Gambar II.1

Elemen Kebijakan



Sumber : Dunn, 2000

Sistem kebijakan (Policy System) atau pola perilaku institusional melalui kebijakan dibuat, mengandung tiga elemen yang memiliki hubungan timbal balik yaitu :

1. Kebijakan Publik (Public Policies)

Merupakan serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak bertindak sama sekali) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang isu (issue areas), yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari pemerintah yang didalamnya terkandung konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan publik adalah Perda No. 11/2000.

2. Lingkungan Kebijakan

Lingkungan kebijakan yaitu suasana tertentu dimana dimana kejadian-kejadian di sekitar isu kebijakan tersebut timbul, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pelaku kebijakan dan kebijakan publik. Lingkungan kebijakan dari Perda No. 11/2000 berada di lingkungan Kecamatan Semarang Tengah dengan karakteristik yang sangat kompleks.

3. Pelaku Kebijakan

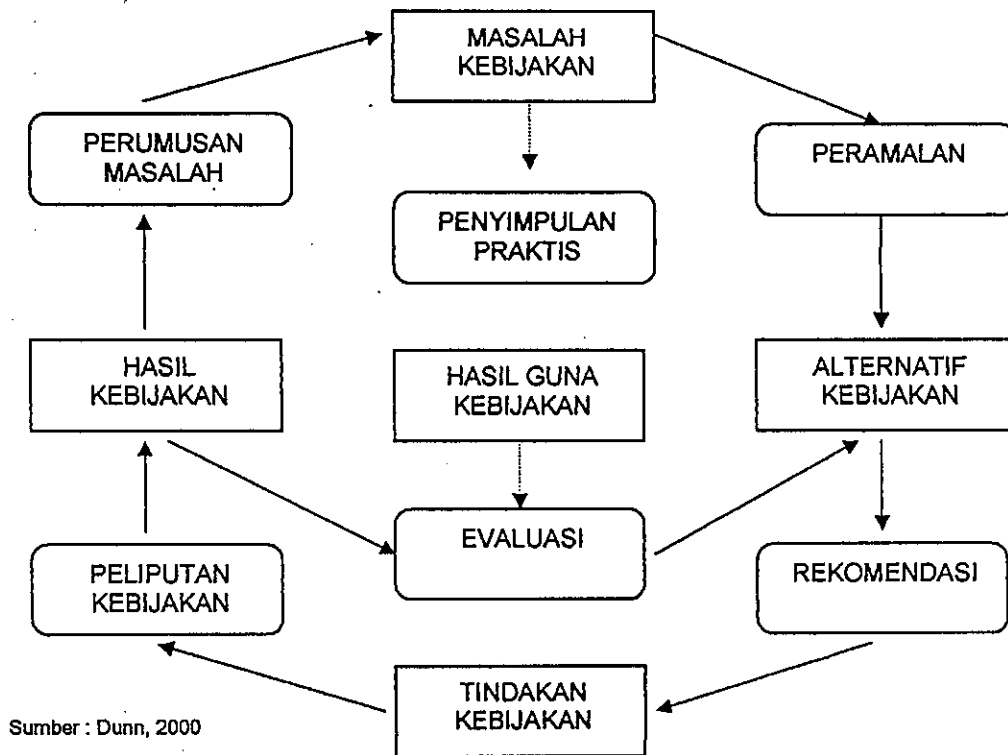
Pelaku kebijakan adalah individu-individu atau kelompok-kelompok pelaku kebijakan yang dapat menciptakan dan menghasilkan sistem kebijakan dalam sistem yang berlaku di lingkungan kebijakan. Dalam penelitian ini pelaku kebijakan diambil dari pihak pedagang kaki lima sebagai responden. Para pelaku kebijakan Perda No. 11/2000 yang lainnya di Semarang adalah Pemerintah Kota Semarang dengan obyeknya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota Semarang. Dengan berdasarkan ketentuan Keputusan Walikota Semarang Nomor 130.2/339 Tahun 2000 terdapat tiga badan penegakan kebijakan Perda yang juga termasuk para pelaku kebijakan yaitu :

- a. Unit Pelaksana Daerah Pengelola Pedagang Kaki Lima (UPD PPKL).
- b. Camat di wilayah Kecamatan Semarang Tengah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin usaha PKL.
- c. Lurah di wilayah Kelurahan dengan wewenang menarik retribusi.

2.3.4. KERANGKA ANALISIS KEBIJAKAN

Analisis kebijakan dapat dipandang sebagai proses penelitian yang melibatkan lima komponen informasi kebijakan yang dipindahkan dari satu posisi ke posisi berikutnya melalui penggunaan berbagai metode analisis kebijakan seperti pada gambar 2.2. di bawah ini :

Gambar II.2 Kerangka Analisis Kebijakan



2.3.5. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui beberapa saluran birokrasi. Implementasi kebijakan meliputi masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, Wahab, 1997). Hal ini berarti menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan (Wahab, 1997).

Menurut Udjoi (Wahab, 1997) menyatakan bahwa : *"The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented"*

(Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan) (Wahab, 1997: 59).

Di dalam kamus Webster (Wahab, 1997: 64) dirumuskan secara singkat bahwa perkataan *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu). Dalam hal ini, implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (dalam bentuk perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, surat keputusan dari eksekutif, surat perintah dari eksekutif, dan sebagainya).

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) merumuskan proses implementasi ini sebagai : "*those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at achievement of objectives set forth in prior policy decisions*" (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau non pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan). Sementara itu Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabastier (1979), menjelaskan makna implementasi ini dengan menyatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan beberapa kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun kejadian dan kegiatan untuk menimbulkan akibat atau dampak yang nyata pada masyarakat (Wahab, 1997).

Dari kedua pendapat tersebut memperjelas bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan

administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran. Hal ini juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat. Dengan demikian pada akhirnya hal tersebut berpengaruh terhadap dampak kebijakan baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Seperti yang diungkapkan oleh Mazmania dan Sabatier (Wahab, 1997) telah merumuskan proses implementasi kebijakan negara sebagai berikut :

"implementation is the carrying out of a basic policy decision, usually in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions. Ideally, that decision identifies the problem(s) to be addressed, stipulates the objective(s) to be pursued, and, in a variety of ways, "structures" the implementation process. The process normally runs through a number of stages beginning with passage of the basic statute, followed by the policy outputs (decisions) of the implementing agencies, the compliance of target groups with those decisions, the actual impact... both intended and unintended of those outputs, the perceived impacts of agency decisions, and finally, important revisions (or attempted revisions) in the basic statute" (implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya).

Dengan demikian dari beberapa pengertian tentang implementasi kebijakan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses pencapaian tujuan kebijakan seperti yang telah

digariskan dalam keputusan kebijakan melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok dari pemerintah maupun non pemerintah.

Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) yang tertuang dalam Perda No. 11/2000 ini pelaksanaannya telah diserahkan langsung ke wilayah Kecamatan sebagai pembina dan Kelurahan sebagai pengawas melalui Keputusan Walikota Nomor 130.2/339 Tahun 2000 pada tanggal 5 Agustus 2000.

Pada dasarnya, Perda No. 11/2000 ini melarang Pedagang Kaki Lima untuk merombak, menambah, mengubah fungsi, dan fasilitas lokasi pedagang kaki lima yang telah disediakan dan atau ditentukan oleh Pemerintah Kota, mendirikan bangunan secara permanen di lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan, memindah tangankan izin tempat usaha pedagang kaki lima kepada pihak lain, melakukan usaha di luar lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan, serta menempati lahan lokasi pedagang kaki lima untuk kegiatan tempat tinggal (hunian).

Namun demikian dalam kenyataanya semua ketentuan dan larangan yang ada di atas tidak dipatuhi oleh para pedagang kaki lima walaupun telah diupayakan adanya penegakan hukum dari aparat kecamatan dan kelurahan. Hal ini diakibatkan adanya beberapa indikator dimana ada beberapa hal atau penyebab pelanggaran dan halangan Perda tersebut seperti (Suara Merdeka, 25 Maret 2002):

- a. Adanya sikap permisif dan kurangnya pemahaman Perda No.11/2000 dari sebagian besar masyarakat kota Semarang.
- b. Adanya ketidak tegasan aparat dalam melaksanakan ketentuan Perda No. 11/2000.

- c. Adanya tokoh masyarakat yang cukup disegani dalam memelopori pendirian bangunan untuk PKL di tempat yang bukan semestinya.
- d. Adanya institusi seperti Universitas Diponegoro di sekitar wilayah kampus Pleburan yang memelopori pendirian bangunan PKL dengan dampaknya yang agak mengkhawatirkan karena jumlah PKL semakin membengkak dan cenderung semakin menyebar.
- e. Adanya ketakutan dari aparat untuk bertindak lebih jauh karena dampak reformasi justru membuat para PKL semakin mempunyai keberanian melawan aparat.

Sementara itu dengan terjadinya perubahan seperti reformasi yang saat ini sedang berlangsung, maka masyarakat menginginkan adanya pergeseran ke arah kondisi sosial yang adil, taraf hidup yang semakin maju (Kumorotomo, 1999: 96). Dengan kata lain masyarakat menuntut serta menghendaki bahwa tuntutan mereka dengan ditandai oleh beberapa faktor yang menjadi halangan terhambat atau tidak tercapainya tujuan Perda No. 11/2000 dengan wajar merupakan hal yang wajar.

Di sisi lain, keengganan dari pihak pejabat pemerintah kota untuk memahami pendapat dari berbagai pihak seringkali juga mengakibatkan tumpulnya kepekaan masyarakat terhadap masalah pembangunan di perkotaan (Kumorotomo, 1999, 97). Hal ini menjadikan partisipasi masyarakat pada umumnya serta PKL pada khususnya dalam memahami suatu kebijakan seperti Perda No. 11/2000 menjadi semakin menurun.

2.4. KARAKTERISTIK LINGKUNGAN PKL (VARIABEL X3)

Variabel lingkungan kebijakan Perda No. 11/2000 ini mencakup tentang karakteristik pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Semarang Tengah dan permasalahannya. Lingkungan PKL dalam konteks kebijakan memiliki kondisi

tertentu dimana kondisi atau keadaan di sekitar lingkungan tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan perda tersebut. Dengan demikian karakteristik lingkungan PKL mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL (Chandrakirana, dkk, 1995).

Karakteristik lingkungan PKL ini dipengaruhi oleh lokasi usaha PKL yang mencakup :

- a. Berdasar Lokasi Lahan PKL
 1. Lokasi dekat pasar/pertokoan
 2. Lokasi dekat perumahan
 3. Lokasi dekat sekolah
 4. Lokasi dekat perkantoran
 5. Lokasi dekat tempat ibadah
- b. Kondisi Lokasi Lingkungan PKL
 1. Tingkat keramaian
 2. Tingkat kerawanan lalu lintas
 3. Tingkat kerawanan kejahatan
 4. Tingkat kebersihan
 5. Tingkat keramahan warga

2.5. HUBUNGAN KARAKTERISTIK PKL DENGAN PERILAKU PKL

Hubungan Karakteristik PKL dengan Perilaku PKL dapat dijelaskan bahwa karakteristik PKL seperti tingkat pendidikan PKL yang rendah, modal usaha yang kecil akan mempengaruhi perilaku PKL terhadap Perda No. 11/2000 terutama dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, kewajiban retribusi, keamanan dan kelestarian lingkungan kota. Demikian juga sebagian besar PKL merupakan PKL bermata pencaharian tetap sebagai PKL. Hal ini membuat para PKL mempunyai pandangan bahwa mereka mau tidak mau dalam menjalankan

usahanya seringkali berperilaku tidak mengindahkan hal-hal seperti ketertiban dan keamanan.

2.6. HUBUNGAN PEMAHAMAN PERDA NO. 11/2000 DENGAN PERILAKU PKL.

Hubungan pemahaman terhadap isi kebijakan Perda No.11/2000 dengan perilaku PKL dapat dijelaskan bahwa semakin paham dan mengertinya para PKL dalam memahami Perda No.11/2000 maka perilaku PKL tersebut akan membawa dampak positif dalam hal menjaga kebersihan, keindahan kota, ketertiban, kewajiban retribusi, keamanan dan kelestarian lingkungan kota. Apabila perilaku PKL tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap maka dengan demikian implementasi dari Perda No. 11/2000 tersebut membawa segi positif bagi kelangsungan kehidupan sehari-hari di kota Semarang khususnya di Kecamatan Semarang Tengah. Namun apabila pemahaman mengenai Perda No. 11/2000 tersebut tampak masih kurang maka perilaku para PKL terhadap Perda No. 11/2000 juga akan membawa dampak yang kurang memuaskan.

Dengan demikian pemahaman isi perda merupakan salah satu tolok ukur dalam implementasi kebijakan Perda No. 11/2000 mengenai pengaturan dan pembinaan PKL di Semarang. Hal ini menjadikan pemahaman terhadap perda memiliki hubungan terhadap perilaku PKL.

2.7. HUBUNGAN KARAKTERISTIK LINGKUNGAN PKL DENGAN PERILAKU PKL

Karakteristik lingkungan PKL mempunyai hubungan dengan perilaku PKL seperti lokasi usaha dan kondisi lingkungan yang rawan akan mempengaruhi perilaku PKL dalam perilakunya terhadap Perda No. 11/2000. dengan demikian karakteristik lingkungan PKL yang mempunyai tingkat ketertiban dan keamanan yang rendah, lingkungan yang ramai, lalu lintas yang rawan, keramahan warga,

rawan kejahatan, kebersihan yang kurang akan mempunyai dampak terhadap perilaku PKL.

2.8. HUBUNGAN KARAKTERISTIK PKL, PEMAHAMAN PERDA NO.11/2000, DAN KARAKTERISTIK LINGKUNGAN PKL DENGAN PERILAKU PKL.

Karakteristik PKL, Pemahaman Perda No.11/2000, dan Karakteristik Lingkungan PKL secara umum mempunyai pengaruh terhadap Perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah. Hal ini dapat dilihat bahwa dengan melihat karakteristik PKL yang beraneka ragam, tingkat pemahaman terhadap Perda No. 11/ 2000 dan karakteristik lingkungan yang beraneka ragam akan membawa perilaku PKL kepada perilaku yang negatif atau positif. Dikatakan negatif jika perilaku PKL tersebut terhadap implementasi Perda No.11/2000 tidak taat dan patuh yang disebabkan oleh karakteristik PKL, rendahnya pemahaman terhadap perda dan karakteristik lingkungan PKL di sekitarnya. Namun diharapkan perilaku PKL adalah mendukung Perda No.11/2000 dimana para PKL bertaku tertib dan menaati semua ketentuan yang ada dalam perda tersebut.

B. PEMBAHASAN PENELITIAN YANG RELEVAN

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmadi Widodo (2000) dalam tesisnya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha PKL (studi kasus kota Semarang) disebutkan bahwa penelitian tersebut merekomendasikan tentang perlunya penelitian lanjutan mengenai PKL secara komprehensif. Dengan berdasarkan penelitian terdahulu tersebut maka penelitian kali ini akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku PKL terhadap Perda No. 11/2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah.

C. HIPOTESIS

Berdasarkan perumusan masalah dan landasan teori yang telah dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian tersebut sebagai berikut :

a. Hipotesis 1, H 1 :

Karakteristik PKL di Kecamatan Semarang Tengah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Perilaku PKL yang mendukung Perda No. 11/2000.

b. Hipotesis 2, H 2 :

Pemahaman PKL tentang Perda No. 11/2000 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut.

c. Hipotesis 3, H 3 :

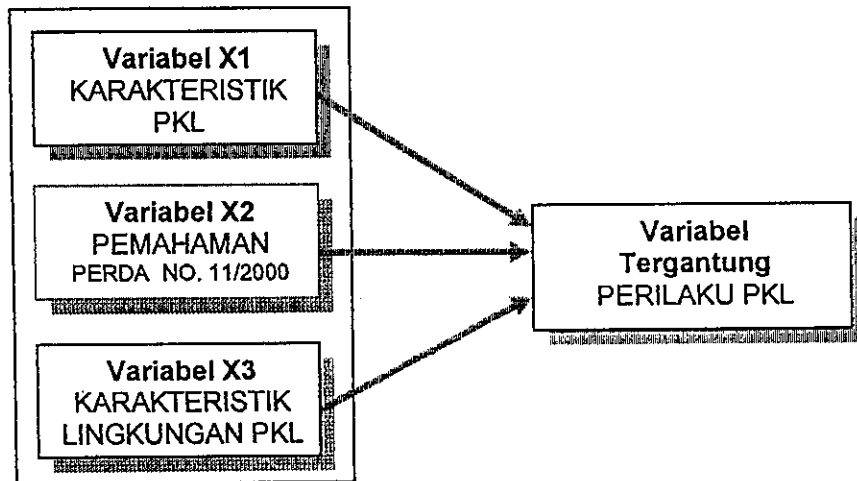
Karakteristik lingkungan PKL di Kecamatan Semarang Tengah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Perilaku PKL dalam mendukung kebijakan Perda No.11/2000.

d. Hipotesis 4, H 4 :

Karakteristik PKL, Pemahaman Perda No. 11/2000, dan Karakteristik Lingkungan PKL mempunyai pengaruh signifikan terhadap Perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah dalam implementasi Perda No. 11/2000.

Gambar II.3

GEOMETRICAL MODEL HIPOTESIS



Keterangan :

Variabel I X1 : Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Variabel II X2 : Pemahaman Kebijakan Perda No. 11/2000

Variabel III X3 : Karakteristik Lingkungan PKL

Variabel Tergantung Y :

Variabel Terpengaruh, Perilaku PKL terhadap kebijakan Perda No. 11/2000 di Kecamatan Semarang Tengah.

BAB III METODE PENELITIAN

B. RANCANGAN PENELITIAN

Rancangan penelitian dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kausal (Ferdinand, 2002, p. 25) yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Sehingga langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian kausal adalah mengidentifikasi hubungan sebab akibat antar variabel, mencari tipe sesungguhnya dari fakta untuk membantu memahami dan memprediksi hubungan, menetapkan pendekatan kausal dari kejadian-kejadian yang berurutan, dan mengukur variasi antara penyebab yang diduga dan akibat yang diduga. Tujuan penelitian kausal adalah untuk mengembangkan model hipotesis-hipotesis yang ada. Sehingga dari model penelitian yang dikembangkan ini, diharapkan dapat menjelaskan hubungan sebab dan akibat antar variabel yang bertujuan memberikan kegunaan dalam bidang kebijakan publik. Dengan demikian, apabila hubungan kausal antara variabel-variabel dalam penelitian ini melalui pengujian hipotesis, maka penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian penjelasan (*explanatory research*) (Singarimbun, 1995, p.5). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku PKL terhadap implementasi kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penanganan masalah PKL khususnya dalam aspek Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan, dan Kesehatan Lingkungan Kota di wilayah Kecamatan Semarang Tengah.

Karena kesimpulan data sampel digunakan untuk mengambil kesimpulan populasi, maka penentuan sampel perlu dilakukan. Populasi penelitian ini mengambil sampel warga masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai

pedagang kaki lima (PKL) di sektor informal di daerah Kecamatan Semarang Tengah.

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini lebih difokuskan kepada analisis perilaku PKL terhadap pelaksanaan kebijakan Perda Pemerintah Kota Semarang No. 11 Tahun 2000 yang mempengaruhi keberhasilan penanganan masalah PKL. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan latar belakang permasalahan pedagang kaki lima di Kecamatan Semarang Tengah dengan ruang lingkup pada masalah perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah.

D. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian dalam penelitian yang berjudul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku PKL Terhadap Perda No. 11/2000 di Kecamatan Semarang Tengah dilakukan di wilayah Kecamatan Semarang Tengah, sebagai pusat kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih mengingat terdapatnya sentra kegiatan kota Semarang seperti Pasar Johar, Kantor Walikota, kawasan Simpang Lima dan beberapa tempat lainnya sebagai pusat kegiatan publik yang vital.

E. VARIABEL PENELITIAN

1. Klasifikasi Variabel

a. Variabel Bebas

- Karakteristik PKL
- Pemahaman Terhadap Perda No. 11/2000
- Karakteristik Lingkungan PKL

b. Variabel Tergantung

- Perilaku PKL terhadap Perda No. 11/2000 di Kecamatan Semarang Tengah.

2. Definisi Konseptual

Konsep adalah unsur dalam penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial ataupun fenomena alami (Singarimbun, 1995: 17). Selanjutnya konsep dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Dalam penelitian ini, definisi konseptual sesuai variabel yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah adalah perilaku dari pedagang kaki lima dalam perilakunya terhadap pelaksanaan kebijakan dari tindakan atau program dan kebijakan Perda No. 11/2000 Pemerintah Kota Semarang yang sedang atau telah diterapkan. Perilaku PKL ini mencakup perilaku PKL dalam kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kelestarian lingkungan kota.
- b. Karakteristik PKL adalah pelaku kebijakan publik yang didalamnya terdapat dua jenis yaitu pelaku yang menerapkan serta melaksanakan kebijakan dan sasaran dari kebijakan yaitu PKL, merupakan suatu institusi publik yang dapat menciptakan dan menghasilkan sistem kebijakan dalam sistem yang berlaku di lingkungan kebijakan yang diterapkan. Karakteristik pedagang kaki lima di Kecamatan Semarang Tengah membawa pengaruh perilaku PKL terhadap kebijakan pembinaan dan pengaturan PKL melalui Perda No 11 Tahun 2000 Pemerintah Kota Semarang

dalam melaksanakan pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Semarang Tengah.

Karakteristik pedagang kaki lima di wilayah kota Semarang ditinjau dengan indikator kondisi PKL tersebut dengan masukan data meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis usaha, lokasi usaha, kemampuan modal, lama usaha, dan jam buka usaha.

- c. Pemahaman kebijakan merupakan sikap dari masyarakat secara umum dan terutama dari kalangan PKL pada khususnya untuk memahami Perda No. 11/2000 dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga Semarang.
- d. Karakteristik Lingkungan PKL adalah lingkungan beserta permasalahan dimana kebijakan Perda No. 11/2000 tersebut diterapkan dengan sasaran adalah para pedagang kaki lima yang membawa pengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan atau tindakan dari program dan kebijakan yang sedang atau telah diterapkan yang mempunyai hasil negatif atau positif. Lingkungan kebijakan juga mencakup berbagai masalah dimana terdapat beberapa problem yang timbul dari suatu kejadian dengan melibatkan beberapa faktor-faktor yang saling bertentangan.

3. Definisi Operasional

Salah satu unsur yang sangat membantu komunikasi dalam penelitian adalah definisi operasional, yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian maka dapat diketahui pengukuran

baik buruknya suatu variabel. Di bawah ini adalah variabel dari penelitian ini yaitu :

a. Perilaku PKL yang diharapkan dalam Perda No. 11/2000 dapat diindikasikan melalui :

1. Perilaku PKL dalam menjaga kebersihan
2. Perilaku PKL dalam hal keindahan kota
3. Perilaku PKL dalam hal kewajiban retribusi
4. Perilaku PKL dalam hal ketertiban dan keamanan
5. Perilaku PKL dalam hal kelestarian lingkungan kota

b. Karakteristik PKL dapat diindikasikan melalui :

1. Pekerjaan Tetap
2. Waktu Usaha
3. Pengembangan Usaha
4. Modal usaha
5. Pendidikan
6. Harga Terjangkau
7. Lama usaha
8. Jenis Kelamin PKL
9. Usia PKL
10. Lokasi Usaha

c. Pemahaman kebijakan diindikasikan dengan :

1. Pemahaman dalam menjaga kebersihan.
2. Pemahaman dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
3. Pemahaman dalam menjaga kelestarian lingkungan.
4. Pemahaman mengenai ketentuan berdagang.
5. Pemahaman dalam kewajiban retribusi.

d. Karakteristik lingkungan PKL dapat diindikasikan dengan :

1. Tingkat kebersihan lingkungan PKL
2. Tingkat keindahan lingkungan PKL
3. Tingkat ketertiban dan keamanan lingkungan
4. Tingkat kelestarian lingkungan kota
5. Tingkat keramaian lingkungan
6. Tingkat kerawanan lalu lintas
7. Tingkat kerawanan kejahatan
8. Tingkat keramahan warga

F. JENIS DAN SUMBER DATA

Data yang dipergunakan pada analisis data adalah data primer dan sekunder.

1. Data Primer berasal dari Kecamatan Semarang Tengah yang antara lain terdiri dari data jumlah PKL, hasil pengamatan langsung, jumlah penduduk, tingkat penghasilan rata-rata, dan data-data lain yang menyangkut PKL.
2. Data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, media massa, serta berbagai sumber relevan lain seperti Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Walikota Semarang Tahun 2001 kepada DPRD kota Semarang mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

G. INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dengan skala ordinal. Kuesioner sebagai suatu instrumen penelitian utama dengan

menggunakan pertanyaan secara terstruktur baik dengan metode tertutup maupun secara terbuka. Instrumen penelitian ini mempunyai suatu pedoman atau tata cara sebagai petunjuk dalam mengajukan pertanyaan yang akan diajukan yang akan dinilai dengan suatu skor.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan skala ordinal dari Likert dengan catatan :

"Semakin tinggi nilai atau score merupakan indikasi sikap positif sedangkan nilai yang rendah menunjukkan sebaliknya".

Skala pengukuran Likert tersebut bertujuan untuk mengukur konsep yang telah dirumuskan pada jenjang ordinal menggunakan seperangkat indikator. Jadi skala pengukuran merupakan kegiatan pemberian nilai atau score yang merupakan angka pada jawaban atas pertanyaan oleh responden untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam pengujian hipotesa. Dengan demikian penilaian instrumen itu akan dapat menghasilkan total score bagi setiap responden.

Dalam memberikan penilaian terhadap jawaban penilaian dalam jawaban responden tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Nilai 4 untuk jawaban sangat mendukung/setuju.
- b. Nilai 3 untuk jawaban mendukung/setuju.
- c. Nilai 2 untuk jawaban kurang mendukung/kurang setuju.
- d. Nilai 1 untuk jawaban tidak mendukung/tidak setuju.

H. POPULASI DAN TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL

1. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh PKL yang mempunyai pekerjaan tetap sebagai pedagang kaki lima (PKL) di sektor informal di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Mengingat populasi yang diteliti jumlahnya begitu besar dan tersebar di beberapa tempat dengan keterbatasan biaya, waktu, dan tenaga maka dalam memperoleh data untuk penelitian ini digunakan suatu cara sampling.

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara simpel (sederhana) yaitu dengan *simple cluster random sampling*. Ada beberapa rumus yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya sampel dalam penelitian diantaranya adalah dengan tabel dan monogram. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel akan menggunakan tabel Krejcie dan monogram yang digunakan adalah monogram Harry King (Sugiyono, 2001). Krejcie dalam melakukan perhitungan ukuran sampel didasarkan atas kesalahan 5 %. Sehingga sampel yang diperoleh mempunyai kepercayaan 95 % terhadap populasi.

Singarimbun (1991:149-150) menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple cluster random sampling*, yaitu penentuan responden dilakukan secara acak dimana masing-masing wilayah diambil sampelnya berdasarkan persentase besarnya populasi secara keseluruhan dengan besarnya populasi keseluruhan di Kecamatan Semarang Tengah.

Sampel yang diambil sebanyak 81 orang PKL dari sampel populasi sebanyak 101 PKL di Kecamatan Semarang Tengah dengan

menggunakan teknik *cluster random sampling* dari populasi keseluruhan 912 PKL.

Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan beberapa metode, antara lain dengan menggunakan rumus Rao (1996: 29) :

$$n = \frac{N}{1 + N (\text{moe})^2}$$

Dimana :

n = jumlah sampel

N = populasi

moe = margin of error max

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa jumlah PKL di wilayah Semarang Tengah adalah sebanyak 912 PKL.

Data ini berdasarkan data PKL resmi dari Laporan Perkembangan PKL pada bulan Agustus 2001 di 9 Kelurahan Kecamatan Semarang Tengah yang meliputi :

Tabel III.1

Penentuan Jumlah Persentase Sampel PKL

No.	Kelurahan	Jumlah PKL	Persentase
1.	Purwodinatan	295 PKL	32,35 %
2.	Gabahan	90 PKL	9,87 %
3.	Kembang Sari	223 PKL	24,45 %
4.	Sekayu	29 PKL	3,18 %
5.	Pendrikan Kidul	30 PKL	3,29 %
6.	Pandan Sari	55 PKL	6,03 %
7.	Brumbungan	40 PKL	4,38 %
8.	Pekunden	79 PKL	8,66 %
9.	Jagalan	71 PKL	7,79 %
	Jumlah keseluruhan sampel	912 PKL	100 %

Jumlah keseluruhan = 912 PKL = 100,00 %

Rata-rata PKL untuk 9 kelurahan = 101,33 = 101 PKL

Dengan demikian maka jumlah sampel menurut Rao (1996,) untuk penelitian ini dengan margin of error sebesar 5% adalah :

$$n = \frac{101}{1 + 101 (5\%)^2}$$

$$n = 80,638 = 81 \text{ PKL}$$

Jadi jumlah sampel yang akan diambil adalah sebanyak 81 PKL di wilayah Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, sesuai dengan jumlah sampel hasil perhitungan dengan rumus Rao (1996: 29) dan memenuhi jumlah sampel yang representatif karena ≥ 60 .

Dengan berdasarkan hasil perhitungan di atas maka penentuan jumlah sampel per kelurahan dapat ditentukan sebagai berikut :

Tabel III.2
Penentuan Jumlah Sampel PKL

No.	Kelurahan	Persentase	Jumlah Sampel
1.	Purwodinatan	32,35 % X 81	26 PKL
2.	Gabahan	9,87 % X 81	8 PKL
3.	Kembang Sari	24,45 % X 81	20 PKL
4.	Sekayu	3,18 % X 81	2 PKL
5.	Pendrikan Kidul	3,29 % X 81	3 PKL
6.	Pandan Sari	6,03 % X 81	5 PKL
7.	Brumbungan	4,38 % X 81	4 PKL
8.	Pekunden	8,66 % X 81	7 PKL
9.	Jagalan	7,79 % X 81	6 PKL
	Jumlah keseluruhan sampel	100,00 % X 81	81 PKL

Masing-masing sampel di setiap kelurahan akan diambil pada titik konsentrasi pedagang yang potensial dalam pelanggaran Perda No. 11/2000.

I. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilakukan melalui :

- a. Kuesioner dengan membagikan kuesioner kepada responden untuk dijawab dengan cermat dan teliti.
- b. Interview Guide/Wawancara langsung dengan beberapa pertanyaan dengan instrumen kuesioner.
- c. Pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh beberapa informasi sesuai dengan kenyataan.

J. TEKNIK ANALISIS DATA

Berbagai data yang telah diperoleh dari penelitian baik data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode :

1. Analisis Kualitatif

Salah satu metode atau teknik yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan berbagai variabel dengan metode kualitatif dengan penjabaran uraian. Analisis kualitatif merupakan suatu analisis yang digunakan untuk membahas dan menerangkan hasil penelitian tentang berbagai gejala atau kasus yang dapat diuraikan dengan menggunakan keterangan-keterangan yang tidak dapat diukur dengan angka-angka tetapi memerlukan penjabaran uraian yang jelas (Sugiyono, 2002,p. 12).

2. Analisis Kuantitatif

Analisis ini digunakan untuk mengolah data statistik untuk mencari tingkat korelasi antar variabel dengan menggunakan rumus Koefisien

Rank – Kendall :

$$T = \frac{S}{\frac{1}{2} N (N-1)}$$

Dimana :

T = Merupakan Koefisien korelasi Kendall

N = Banyaknya obyek atau individu yang diurutkan pada X dan Y

S = Jumlah observasi skore untuk semua pasangan

Apabila ternyata banyak nilai yang sama pada observasi X dan Y, maka rumus yang digunakan adalah :

$$T = \frac{S}{\sqrt{\frac{1}{2} N (N-1) - T_x \frac{1}{2} (N-1) - T_y}}$$

Keterangan :

T_x = Banyaknya observasi berangka sama dengan tiap kelompok angka sama pada variabel X

T_y = Banyaknya observasi berangka sama dengan tiap kelompok angka sama pada variabel Y

Untuk uji signifikasinya dengan menggunakan rumus Z test, maka karena N penelitian lebih besar dari 10, dengan rumus sebagai berikut :

$$Z = \frac{T}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N-1)}}$$

Kemudian harga Z dikonsultasikan dengan tabel untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara variabel tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila $Z_o > Z_t$ pada taraf signifikansi 1%, sangat signifikan, hipotesis ditolak.
- b. Apabila $Z_o > Z_t$ pada taraf signifikansi 5%, signifikan, hipotesis ditolak.
- c. Apabila $Z_o < Z_t$ pada taraf signifikansi 5%, signifikan, hipotesis diterima.

Untuk menghitung korelasi antara keempat variabel (variabel karakteristik PKL, pemahaman Perda No.11/ 2000, karakteristik lingkungan PKL dan perilaku PKL) digunakan metode Kendall Coefficient of Concordance W dengan rumus :

$$W = \frac{S}{\frac{1}{2} K^2 (N-N) - K \sum T}$$

Keterangan :

- W = Koefisien Konkordasi rank Kendall
- S = Jumlah kuadrat deviasi dari mean R_j
- K = Banyak himpunan ranking perjenjangan
- N = Banyaknya obyek atau individu yang diberi ranking
- Σ = Jumlah harga T untuk semua tangking k

dimana :

$$S = \sum R_j \left[\begin{array}{c} R_j \\ \Sigma \\ N \end{array} \right]^2$$

$$T = T_{x1} + T_{y2} + T_{xy}$$

R_j = Jumlah ranking yang diberikan untuk tiap N obyek

T = korelasi

Jika terdapat angka yang sama dalam jumlah yang besar, maka rumus W perlu dikorelasi sebagai berikut :

t = banyaknya observasi dalam suatu kelompok yang memperoleh angka dalam masing-masing rangking

T = Faktor Korelasi

Σ = mengarahkan kita menjumlahkan semua kelompok angka sama dalam masing-masing rangking.

Dimana :

Sedangkan untuk menguji signifikansi konkordansi Kendall tersebut dengan chi-square atau untuk menguji signifikansi koefisien konkordansi Kendall tersebut perlu diadakan tes dengan rumus sebagai berikut :

χ^2 = Chi-Square

W = Koefisien Konkordansi Kendall

Kemudian hasil perhitungan χ^2 tersebut dikonsultasikan terhadap harga square dengan debitur = $M - 1$.

- a. Jika χ^2 hitung > χ^2 tabel, maka hubungan yang ada dinyatakan signifikan atau berarti sebaliknya.
- b. Jika χ^2 hitung < χ^2 tabel, maka hubungan yang ada dinyatakan tidak signifikan atau tidak berarti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian melalui beberapa pertanyaan yang diajukan kepada responden. Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner langsung kepada para responden yang bermata pencaharian sebagai pedagang kaki lima. Jumlah sampel diambil 81 responden dari populasi rata-rata PKL untuk 9 kelurahan di Kecamatan Semarang Tengah sebesar 101.

Pada dasarnya, Perda No. 11/2000 ini mengatur dan membina para PKL di Kota Semarang. Perda ini didalamnya antara lain mencakup larangan bagi PKL untuk merombak, menambah, mengubah fungsi dan fasilitas lokasi pedagang kaki lima yang telah disediakan dan atau ditentukan oleh pemerintah kota, mendirikan bangunan secara permanen di lokasi terlarang, memindahkan ijin tempat-usaha pedagang kaki lima kepada pihak lain, melakukan usaha di luar lokasi PKL yang telah ditetapkan, serta menempati lahan lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal (hunian). Namun seringkali ketentuan tersebut tidak diindahkan oleh PKL meski telah diupayakan adanya penegakan hukum dari aparat.

Guna menunjukkan hasil penelitian, maka akan dilakukan deskripsi distribusi yang meliputi tiga variabel independen, yaitu karakteristik PKL, pemahaman kebijakan Perda No.11/2000 dan karakteristik lingkungan PKL, serta satu variabel dependen yaitu perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah. Analisis kuantitatif data hasil penelitian ini akan ditampilkan dalam bentuk tabel silang antara variabel independen dan variabel dependen. Penggunaan tabel

tunggal dan tabel silang ini diharapkan dapat memberi gambaran secara menyeluruh tentang hubungan antar variabel.

Hasil penelitian juga dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan rumus statistik Rank Kendall untuk mencari hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen dari data nominal yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian. Perhitungan Rank Kendall juga menggunakan bantuan Program SPSS.

A.1. IDENTITAS RESPONDEN

Untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terlebih dahulu akan dilakukan pembahasan deskripsi identitas responden yang meliputi jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan responden dalam pertanyaan pembuka kuesioner.

a. JENIS KELAMIN RESPONDEN

Dilihat dari jenis kelamin responden ternyata jumlah responden laki-laki lebih banyak dibanding responden wanita yang bermata pencaharian sebagai pedagang kaki lima. Perbandingan responden laki-laki dan dengan perempuan dapat dilihat pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1.

Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Responden	Persentase
1	Laki-laki	48	59.3
2	Wanita	33	40.7
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner identitas responden no. a

Dari tabel di atas jumlah laki-laki sebesar 59,3 % responden sedangkan jumlah wanita sebesar 40,7 %. Responden. Besarnya persentase laki-laki dibandingkan perempuan menunjukkan bahwa jenis pekerjaan ini adalah jenis

pekerjaan yang lebih banyak membutuhkan kekuatan fisik daripada kemampuan (skill). Meskipun tidak tertutup kemungkinan wanita untuk masuk ke dalam jenis pekerjaan ini, namun tetap saja laki-laki lebih dominan dalam jenis pekerjaan ini. Hal ini pada akhirnya memberikan pengaruh terhadap karakteristik PKL dalam perilakunya mendukung Perda No. 11/2000.

b. UMUR RESPONDEN

Umur responden pada saat penelitian berlangsung dibedakan menjadi dua yakni di bawah 30 tahun serta di atas 30 tahun. Dengan demikian maka prosentase umur responden dapat diperhatikan pada Tabel IV.2.

Tabel IV.2.

Umur Responden

No.	Umur	Responden	Persentase
1	Di bawah 30 Tahun	41	50.6
2	Di atas 30 Tahun	40	49.4
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner Identitas responden no. b

Dari data di atas maka tampak komposisi umur responden pada saat penelitian ini berlangsung, dimana 50,6 % responden pada saat ini berumur di bawah 30 tahun dan sisanya sebesar 49,4% responden di atas 30 tahun. Hal ini menunjukkan komposisi umur responden cukup berimbang, jadi tidak ada kelompok usia yang mendominasi responden. Dengan demikian umur responden dalam kaitannya dengan perilaku PKL terhadap Perda No.11/2000 tidak terlalu didominasi oleh umur tertentu.

c. TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN

Tingkat pendidikan responden hanya dibedakan menjadi tiga kategori yakni SD, SMP dan SMA. Dengan demikian maka persentase responden pada kategori tersebut dapat diperhatikan pada Tabel IV.3.

Tabel IV.3.

Komposisi Tingkat Pendidikan Responden

No.	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase
1	Setara SD	44	54.3
2	Setara SMP	22	27.2
3	Setara SMA	15	18.5
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner Identitas responden no. c

Dari tabel di atas diketahui responden yang berpendidikan SD 54,3 %, berpendidikan SMP 27,2 %, dan selebihnya 18,5 % berpendidikan SMA. Hal ini menunjukkan bahwa pada jenis pekerjaan ini lebih banyak responden tidak memiliki basis tingkat pendidikan yang tinggi. Dengan demikian derajat pemahaman mereka terhadap Perda No.11/2000 masih diragukan.

d. **LOKASI USAHA**

Lokasi usaha hanya dibedakan menjadi dua kategori yaitu di wilayah rawan dan di wilayah aman. Dengan demikian maka persentase responden pada kategori tersebut dapat diperhatikan pada tabel IV.4 berikut :

Tabel IV.4

Komposisi Lokasi Usaha

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Di wilayah rawan	26	32.1
2	Di wilayah aman	55	67.9
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner Identitas responden no. d

Dari tabel di atas diketahui bahwa responden berlokasi di wilayah rawan berjumlah 32,1 % responden dan 67,9 % responden di wilayah aman. Hal ini berarti bahwa para responden ini didominasi oleh PKL yang berlokasi di wilayah

yang cukup aman. Hal ini mengindikasikan bahwa lokasi usaha PKL yang menjadi responden penelitian ini dapat dikategorikan cukup baik.

e. JENIS USAHA

Komposisi jenis usaha dibedakan menjadi tiga kategori yaitu jenis usaha konsumsi, jenis usaha jasa dan di luar konsumsi dan jasa. Dengan demikian maka persentase responden pada kategori tersebut dapat dilihat pada tabel IV.5 berikut :

Tabel IV.5.

Jenis Usaha

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Konsumsi	56	69.1
2	Jasa	15	18.5
3	Diluar konsumsi dan jasa	10	12.3
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner Identitas responden no. e

Dari tabel di atas diketahui bahwa responden dengan jenis usaha konsumsi berjumlah 69,1%, responden atau dengan jenis usaha jasa , 18,5 % responden dan sisanya sebesar 12,3% responden di luar konsumsi dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam responden ini didominasi oleh PKL dengan jenis usaha konsumsi, terutama makanan dan minuman, yang tentu saja memberi kontribusi pada penambahan sampah. Hal ini berarti bahwa perilaku PKL yang melanggar Perda No.11/2000 sebagian besar berasal dari PKL jenis usaha konsumsi.

f. **LAMA USAHA**

Komposisi lama usaha dibedakan menjadi tiga kategori yaitu di bawah 1 tahun, 1 sampai dengan 3 tahun dan di atas 3 tahun. Dengan demikian maka persentase lama usaha pada kategori ini dapat dilihat pada tabel IV.6 berikut :

Tabel IV.6.

Komposisi Lama Usaha

No.	Lama Usaha	Responden	Persentase
1	Dibawah 1 Tahun	17	21.0
2	1 tahun sampai dengan 3 tahun	46	58.8
3	Di atas 3 tahun	18	22.2
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner Identitas responden no. f

Dari tabel di atas diketahui bahwa responden dengan lama usaha di bawah 1 tahun berjumlah 21% responden atau dengan lama usaha 1 tahun sampai dengan 3 tahun berjumlah 56,8 % responden dan sisanya sebesar 22,2% responden di atas 3 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam responden ini didominasi oleh PKL dengan lama usaha 1 tahun sampai dengan 3 tahun, berarti responden adalah PKL yang relatif matang mengingat PKL yang bisa bertahan di atas 1 tahun berarti usahanya mulai mapan. Dengan demikian sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah PKL yang sudah cukup lama melakukan usahanya dan memperbesar peluang berperilaku melanggar Perda No.11/2000.

A.2. PERILAKU PKL

Pembahasan tentang perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah dipengaruhi oleh banyak variabel, dalam penelitian ini dipilih variabel karakteristik PKL, pemahaman kebijakan Perda No. 11/2000 dan karakteristik lingkungan PKL. Dari hasil penelitian dapat diketahui dimana perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah diindikasikan dari kesadaran PKL dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota, kesadaran PKL membayar retribusi, kesadaran PKL menjaga ketertiban dan keamanan dan kesadaran PKL menjaga kelestarian lingkungan kota. Tingkat kesadaran PKL dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota dapat terlihat sebagai berikut : 21 % responden menyatakan sering sekali, 27,2 % responden menyatakan sering, 33,3 % responden menyatakan kadang-kadang dan hanya 18,5 % responden yang menyatakan tidak pernah menjaga kebersihan lingkungan usahanya. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa kesadaran responden dalam menjaga kebersihan lingkungan usaha responden dapat dikategorikan rendah, hal ini menunjukkan perilaku PKL yang kurang baik.

Tabel IV.7
Usaha Menjaga Kebersihan

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sering Sekali	17	21.0
2	Selalu	22	27.2
3	Kadang-kadang	27	33.3
4	Tidak Pernah	15	18.5
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 1

Untuk mengetahui keseriusan PKL dalam menjaga kebersihan perlu diuji apakah PKL mau membantu petugas kebersihan dalam usaha menjaga

kebersihan. Dari hasil penelitian ternyata 25,9 % responden menyatakan sering sekali, 25,9 % responden menyatakan selalu, 22,2 % responden menyatakan kadang-kadang dan 25,9 % responden menyatakan tidak pernah membantu petugas kebersihan dalam usaha menjaga kebersihan. Adanya jawaban kadang-kadang dan tidak pernah memerlukan penelitian lebih lanjut apakah karena keinginan responden sendiri atau karena tidak adanya petugas kebersihan yang menjalankan tugasnya di lokasi usaha responden tersebut. Bila alasan kedua yang dipilih, maka pemerintah kota seharusnya lebih memperhatikan cakupan wilayah kerja (working coverage) bagi petugas kebersihan. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel IV.8.

Tabel IV.8.

Usaha Membantu Petugas Kebersihan

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sering Sekali	21	25.9
2	Selalu	21	25.9
3	Kadang-kadang	18	22.2
4	Tidak Pernah	21	25.9
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 2

Disamping itu keseriusan PKL dalam menjaga kebersihan juga terlihat pada usaha menjaga kebersihan kiosnya masing-masing. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 14,8 % responden atau menyatakan sering sekali, 24,7 % responden menyatakan selalu, 43,2 % responden menyatakan kadang-kadang dan 17,3 % responden menyatakan tidak pernah menjaga kebersihan kiosnya. Dari data di atas dapat diinterpretasikan bahwa secara umum PKL telah memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan lokasi usahanya (dari akumulasi persentase sebesar 74,1%) meskipun masih terdapat beberapa responden yang tidak

mau tahu kondisi lokasi usahanya. Hal ini perlu penanganan lebih lanjut dari pemerintah kota, untuk memberikan pengertian dan atau ajakan persuasif kepada mereka untuk menjaga kebersihan yang dimulai dari kebersihan kios mereka masing-masing. Dengan demikian perilaku PKI dalam usaha menjaga kebersihan kios dapat dikatakan cukup mendukung Perda No.11/2000 walaupun masih perlu ditingkatkan lagi. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel IV.9.

Tabel IV.9.

Usaha Menjaga Kebersihan Kios

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sering Sekali	12	14.8
2	Selalu	20	24.7
3	Kadang-kadang	35	43.2
4	Tidak Pernah	14	17.3
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 3

Sementara itu kesadaran PKL untuk menjaga ketertiban dan keamanan sebagai indikator perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini. Kemauan PKL untuk berpartisipasi mengatasi tindak kejahatan yang terjadi di sekitar lokasi usaha terlihat sebagai berikut : 28,4 % responden menyatakan sering sekali, 17,3 % responden menyatakan selalu, 30,9 % responden menyatakan kadang-kadang dan 23,5 % responden menyatakan tidak pernah berpartisipasi dalam mengatasi tindak kejahatan yang terjadi di lokasi usaha. Interpretasi dari data di atas adalah bahwa responden tidak ragu-ragu untuk membantu aparat keamanan untuk mengatasi tindak kejahatan yang terjadi. Hanya saja yang perlu diwaspadai adalah pembatasan-pembatasan sampai sejauh mana mereka boleh memperlakukan pelaku kejahatan yang tertangkap, sebab saat sekarang ini keadilan telah

berangsur berubah menjadi keadilan jalanan (street justice). Data yang lengkap disajikan dalam Tabel IV.10.

Tabel IV.10.
Partisipasi Mengatasi Tindak Kejahatan

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sering Sekali	23	28.4
2	Selalu	14	17.3
3	Kadang-kadang	25	30.9
4	Tidak Pernah	19	23.5
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 4

Kemauan PKL untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan usaha juga dapat diuji, dimana 28,4 % responden menyatakan sering sekali, 17,3 % responden menyatakan selalu, 30,9 % responden menyatakan kadang-kadang dan 23,5 % responden menyatakan tidak pernah ikut menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan usaha. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden (86,4 %) telah memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya ketertiban dan keamanan di lokasi usaha mereka. Perilaku PKL ini dapat dikatakan cukup baik dalam mendukung Perda No.11/2000. Hal ini sebenarnya menjadi pembuktian akan komitmen mereka untuk menolak persepsi masyarakat bahwa kompleks PKL di Semarang Tengah identik dengan kriminalitas seperti pencurian dan penadahan barang hasil curian. Meskipun kadang-kadang mereka menyadari bahwa usaha yang mereka lakukan masih sangat terbatas dan belum memperoleh hasil yang maksimal. Identifikasi data lengkap dapat dilihat pada Tabel IV.11. berikut.

Tabel IV.11.

Usaha Menjaga Ketertiban dan Keamanan

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sering Sekali	23	28.4
2	Selalu	23	28.4
3	Kadang-kadang	24	29.6
4	Tidak Pernah	11	13.6
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 5

Untuk menjaga ketertiban juga perlu diketahui apakah PKL berusaha tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dalam menjalankan usahanya, dimana dari hasil penelitian diketahui bahwa 24,7 % responden menyatakan sering sekali, 22,2 % responden menyatakan selalu, 24,7% responden menyatakan kadang-kadang dan 28,4 % responden menyatakan tidak pernah berusaha tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dalam menjalankan usahanya. Interpretasi dari data ini adalah bahwa responden memiliki pengertian dan berperilaku yang cukup baik tentang ketertiban lalu lintas, untuk mengeliminir dampak kemacetan lalu lintas (traffic jam) terhadap lingkungan. Tetapi pada kasus-kasus tertentu masih terjadi kemacetan, seperti pada jam-jam sibuk, hal ini biasa terjadi karena jalan tempat lokasi PKL tidak terlalu besar. Untuk lebih jelasnya data dapat dilihat pada Tabel IV.12.

Tabel IV.12.

Upaya Tidak Mengganggu Kelancaran Lalu Lintas

No.	Jawaban	Frequency	Persentase
1	Sering Sekali	20	24.7
2	Selalu	18	22.2
3	Kadang-kadang	20	24.7
4	Tidak Pernah	23	28.4
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 6

Selain menjadi indikasi penyebab kemacetan lalu lintas, PKL juga dituduh menjadi penyebab ketidaknyamanan para pejalan kaki yang melewati trotoar, untuk itu diuji apakah PKL selalu berupaya untuk tidak mengganggu pejalan kaki. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa 29,6 % responden menyatakan sering sekali, 19,8 % responden menyatakan selalu, 16 % responden menyatakan kadang-kadang dan 34,6% responden menyatakan tidak pernah berupaya untuk tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Data tersebut menunjukkan bahwa secara sendiri-sendiri responden yang tidak pernah berupaya tidak mengganggu kenyamanan pejalan kaki justru berada di posisi paling atas. Namun meskipun demikian, total responden yang menjawab sering sekali, selalu dan kadang-kadang tetap lebih besar (65,4 %) sehingga secara umum responden dianggap telah memiliki kesadaran yang tinggi dalam hal menjaga kelancaran lalu lintas. Untuk data yang lebih jelas terlihat pada Tabel IV.13.

Tabel IV.13.

Upaya Tidak Mengganggu Pejalan Kaki

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sering Sekali	24	29.6
2	Selalu	16	19.8
3	Kadang-kadang	13	16.0
4	Tidak Pernah	28	34.6
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 7

Peraturan untuk tidak menggunakan saluran air atau trotoar ternyata mendapat sanggahan dari responden. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 19,8 % responden menyatakan sangat setuju, 18,5 % responden menyatakan setuju, 38,3 % responden menyatakan tidak setuju dan 19,23,5 % responden menyatakan sangat tidak setuju jika lahan PKL tidak

berada di atas saluran air dan trotoar. Data tersebut mengindikasikan bahwa responden kebanyakan tidak setuju jika ada larangan untuk tidak menggunakan saluran air dan trotoar sebagai tempat usahanya, alasannya mereka tidak punya tempat lain untuk membuka usahanya yang lebih representatif dan menjanjikan bagi kelancaran usahanya. Hasil selengkapnya dapat terlihat pada Tabel IV.14.

Tabel IV.14.

Lahan PKL Tidak di atas Saluran Air dan Trotoar

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	16	19.8
2	Setuju	15	18.5
3	Tidak Setuju	31	38.3
4	Sangat Tidak Setuju	19	23.5
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 8

Kesadaran responden dalam membayar retribusi yang ditetapkan pemerintah diuji dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 17,3 % responden menyatakan sering sekali, 29,6 % responden menyatakan selalu, 32,1 % responden menyatakan kadang-kadang dan 21 % responden menyatakan tidak pernah membayar retribusi kepada pemerintah. Dengan data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki kesadaran untuk membayar retribusi seperti yang disyaratkan oleh pemerintah meskipun terdapat beberapa responden yang memberikan pernyataan tidak pernah. Data yang lebih lengkap tersaji dalam tabel IV.15 di bawah ini.

Tabel IV.15.

Membayar Retribusi

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sering Sekali	14	17.3
2	Selalu	24	29.6
3	Kadang-kadang	26	32.1
4	Tidak Pernah	17	21.0
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 9

Kesadaran responden dalam menjaga kelestarian lingkungan kota juga perlu diuji. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 33,3% responden menyatakan sering sekali, 18,5 % responden menyatakan selalu, 17,3% responden menyatakan kadang-kadang dan 30,9% responden menyatakan tidak pernah berupaya menjaga kelestarian lingkungan kota. Dengan data di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat keengganan dari responden untuk menjaga kelestarian lingkungan kota terbukti masih banyak responden yang memberikan pernyataan kadang-kadang dan tidak pernah dalam kuesioner. Data yang lebih lengkap tersaji dalam tabel IV.16 di bawah ini.

Tabel IV.16.
Upaya Menjaga Kelestarian Kota

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sering Sekali	27	33.3
2	Selalu	15	18.5
3	Kadang-kadang	14	17.3
4	Tidak Pernah	25	30.9
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 10

A.3. KARAKTERISTIK PKL

Pertanyaan tentang PKL sebagai pekerjaan tetap ternyata mendapat sanggahan dari responden. Dari hasil penelitian tampak bahwa 6,2% responden menyatakan sangat setuju, 33,3% responden menyatakan setuju, 29,6% responden menyatakan tidak setuju dan 30,9 % responden menyatakan sangat tidak setuju untuk memilih PKL sebagai pekerjaan tetap. Hal ini membuktikan bahwa untuk masa mendatang para responden yang sekarang bermata pencaharian sebagai PKL masih mempunyai pemikiran untuk mencari mata pencaharian lain yang tentunya lebih baik dari segi finansial. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel IV.17 berikut ini.

Tabel IV.17.
Memilih PKL Sebagai Pekerjaan Tetap

No.	Jwaban	Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	5	6.2
2	Setuju	27	33.3
3	Tidak Setuju	24	29.6
4	Sangat Tidak Setuju	25	30.9
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 10

Adanya peraturan pembatasan waktu usaha tampaknya juga ditentang oleh responden. Terlihat dari hasil penelitian bahwa 8,6 % responden menyatakan sangat setuju, 21 % responden menyatakan setuju, 30,9 % responden menyatakan tidak setuju dan 39,5 % responden menyatakan sangat tidak setuju adanya pembatasan waktu usaha. Hal ini menunjukkan bahwa responden menginginkan waktu usahanya tidak dibatasi oleh pemerintah, kapan mereka harus membuka usahanya dan

kapan mereka harus menutup usahanya. Mereka beralasan bahwa rejeki PKL tidak ditentukan oleh waktu usaha, pada saat apapun rejeki bisa datang dan mereka harus selalu siap di lokasi usahanya bila perlu 24 jam. Data untuk itu tersaji dalam tabel IV.18.

Tabel IV.18.
Pembatasan Waktu Usaha

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	7	8.6
2	Setuju	17	21.0
3	Tidak Setuju	25	30.9
4	Sangat Tidak Setuju	32	39.5
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 12

Kemungkinan perkembangan usaha PKL di masa mendatang ternyata ditanggapi dengan pesimis oleh para responden. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 12,3 % responden menyatakan sangat setuju, 17,3 % responden menyatakan setuju, 38,3 % responden menyatakan tidak setuju dan 32,1 % responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa usaha PKL akan berkembang di masa mendatang. Fakta ini menunjukkan bahwa responden menganggap PKL telah mencapai titik puncaknya dan tidak dapat lagi mengalami perkembangan ke tingkat yang lebih tinggi. Adanya anggapan itu diharapkan, para responden (PKL) akan mencari mata pencaharian lain dan kemungkinan akan menurunkan jumlah PKL yang ada terutama di Kecamatan Semarang Tengah. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel IV.19.

Tabel IV.19.

Usaha PKL akan Berkembang di Masa Mendatang

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	10	12.3
2	Setuju	14	17.3
3	Tidak Setuju	31	38.3
4	Sangat Tidak Setuju	26	32.1
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 13

Pertanyaan selanjutnya bahwa PKL tidak membutuhkan modal besar juga diprotes oleh para responden. Dari hasil penelitian terlihat bahwa 16% responden menyatakan sangat setuju, 22,2% responden menyatakan setuju, 32,1 % responden menyatakan tidak setuju dan 29,6 % responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa PKL tidak membutuhkan modal besar. Hal ini membuktikan bahwa responden menganggap modal yang mereka keluarkan untuk usahanya cukup besar bagi mereka, hal ini bisa dipahami mengingat besar kecilnya modal sangat relatif tergantung pada kemampuan finansial masing-masing orang. Sebab jumlah yang menurut sebagian orang dianggap kecil ternyata sebagian orang yang lain menganggapnya besar. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel IV.20 berikut ini.

Tabel IV.20.

PKL Tidak Membutuhkan Modal Besar

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	13	16.0
2	Setuju	18	22.2
3	Tidak Setuju	26	32.1
4	Sangat Tidak Setuju	24	29.6
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 14

Pendidikan PKL dalam penalaran seharusnya tidak perlu tinggi, demikian pulalah menurut pendapat responden. Tampak dari hasil penelitian bahwa 11,1 % responden menyatakan sangat setuju, 22,2 % responden menyatakan setuju, 32,1 % responden menyatakan tidak setuju dan 38,6% responden atau menyatakan sangat tidak setuju bahwa PKL membutuhkan pendidikan tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa responden sadar bahwa pekerjaan yang mereka lakukan tidak memerlukan pendidikan formal yang tinggi (menurut mereka paling tinggi lulusan SMA), karena yang lebih dibutuhkan adalah keahlian spesifik seperti bengkel, penjahit dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan akan mempengaruhi pemahaman terhadap Perda No. 11/2000 dan perilaku PKL yang cenderung melanggar Perda tersebut. Data yang lengkap dapat dilihat pada tabel IV.21.

Tabel IV.21.

PKL Membutuhkan Pendidikan Tinggi

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	9	11.1
2	Setuju	18	22.2
3	Tidak Setuju	26	32.1
4	Sangat Tidak Setuju	28	34.6
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 15

Pernyataan bahwa pendapatan mampu mengembangkan usaha PKL ternyata disikapi oleh responden dengan skeptis. Terlihat dari hasil penelitian bahwa 18,5 % responden menyatakan sangat setuju, 23,5 % responden menyatakan setuju, 27,2 % responden menyatakan tidak setuju dan 30,9 % responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa pendapatan mampu mengembangkan usaha. Hal ini berarti selama ini lebih banyak usaha yang berpendapatan pas-pasan, tidak untung besar tetapi juga tidak merugi. Hal ini dapat dipahami mengingat margin laba

yang ditetapkan responden juga tidak tinggi sehingga laba yang mereka dapatkan pun tidak setinggi toko permanen. Data selengkapnya disajikan dalam tabel IV.22.

Tabel IV.22.

Pendapatan Mampu Mengembangkan Usaha

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	15	18.5
2	Setuju	19	23.5
3	Tidak Setuju	22	27.2
4	Sangat Tidak Setuju	25	30.9
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 16

Harga yang ditetapkan responden yang dianggap tinggi oleh sebagian masyarakat ternyata disangkal oleh responden. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 24,7 % responden menyatakan sangat setuju, 19,8 % responden menyatakan setuju, 29,6 % responden menyatakan tidak setuju dan 25,9 % responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa barang/ jasa yang dijual tidak terjangkau harganya. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini responden merasa harga yang ditetapkan tersebut seharusnya mampu dijangkau oleh para konsumen mereka, tetapi sekali lagi faktor relativitas menjadi faktor penghalang bertemunya kedua kubu ini. Data selengkapnya terlihat pada tabel IV.23. berikut ini.

Tabel IV.23.

Barang/Jasa yang Dijual Tidak Terjangkau Harganya.

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	20	24.7
2	Setuju	16	19.8
3	Tidak Setuju	24	29.6
4	Sangat Tidak Setuju	21	25.9
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 17

Lamanya usaha responden diuji dalam penelitian ini agar diketahui kematangan usaha responden. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 21% responden menyatakan sudah terlalu lama, 21 % responden menyatakan lama, 27,2 % responden menyatakan tidak terlalu lama dan 30,9 % responden menyatakan sangat baru berdiri dalam hal lamanya usaha. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok responden tersebut sebagian besar belum terlalu lama dalam berusaha sebagai PKL (kurang dari 5 tahun), sehingga tingkat keamanan usahanya belum dapat diukur secara pasti dan terperinci. Data yang lebih lengkap dapat dilihat pada tabel IV.24.

Tabel IV.24.
Lama Melakukan Usaha

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sudah Terlalu Lama (Lebih dari 10 tahun)	17	21.0
2	Lama (Kurang dari 10 tahun)	17	21.0
3	Tidak Terlalu Lama (Di bawah 5 tahun)	22	27.2
4	Baru Berdiri (Kurang dari 1 tahun)	25	30.9
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 18

Pertanyaan mengenai bahwa pria lebih dibutuhkan dari wanita, dengan melihat hasil penelitian diketahui bahwa 19,8 % responden menyatakan sangat setuju, 19,8 % responden menyatakan setuju, 33,3 % responden menyatakan tidak setuju dan 27,2 % responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa pria lebih dibutuhkan dibanding wanita. Data tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan responden tidak membatasi gender untuk masuk ke dalam usaha, tanpa memperdulikan jenis kelamin asalkan mereka mampu siapa saja bisa masuk ke dalam usaha PKL ini. Namun mereka menganggap persaingan antar PKL merupakan persaingan "lelaki" dimana dunia PKL identik dengan jalan hidup yang keras yang wanita dianggap kurang mampu menggelutinya. Dari data tersebut jelas bahwa kecenderungan perilaku PKL yang melanggar Perda

No. 11/2000 sebagian besar didominasi oleh PKL laki-laki. Data yang selengkapnya terlihat pada tabel IV.25 berikut ini.

Tabel IV.25.

Pria Lebih dibutuhkan Dibanding Wanita

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	16	19.8
2	Setuju	16	19.8
3	Tidak Setuju	27	33.3
4	Sangat Tidak Setuju	22	27.2
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 19

Kebutuhan tenaga kerja juga menjadi sorotan dalam penelitian ini terutama dari usia dan produktivitasnya. Dari hasil penelitian terlihat bahwa 19,8 % responden menyatakan sangat setuju, 19,8 % responden menyatakan setuju, 30,9% responden menyatakan tidak setuju dan 29,6% responden atau menyatakan sangat tidak setuju bahwa dibutuhkan tenaga kerja dewasa dan produktif. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden beranggapan bahwa berapapun usia seseorang asalkan ada kemauan dan kemampuan pasti bisa bekerja sebagai PKL. Dalam kenyataannya pun tak jarang kita jumpai PKL yang masih berusia jauh di bawah dewasa bahkan bisa disebut sebagai usia anak-anak (di bawah 12 tahun). Data untuk itu dapat dilihat pada tabel IV.26.

Tabel IV.26.

Dibutuhkan Tenaga Kerja Dewasa dan Produktif

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	16	19.8
2	Setuju	16	19.8
3	Tidak Setuju	25	30.9
4	Sangat Tidak Setuju	24	29.6
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 20

Dengan melihat hasil penelitian diketahui bahwa 21 % responden menyatakan sangat setuju, 25,9 % responden menyatakan setuju, 17,3 %

responden menyatakan tidak setuju dan 35,8 % responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa jenis usaha terkait dengan lingkungan. Data yang selengkapnya terlihat pada tabel IV.27 berikut ini.

Tabel IV.27.

Jenis Usaha Terkait dengan Lingkungan

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	17	21.0
2	Setuju	21	25.9
3	Tidak Setuju	14	17.3
4	Sangat Tidak Setuju	29	35.8
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 21

A.4. PEMAHAMAN PERDA No. 11/2000

Indikator yang ketiga untuk mengetahui Perilaku PKL adalah Pemahaman Perda No.11/2000. Tingkat pemahaman responden akan Perda No. 11/2000 ini juga diuji oleh penelitian ini. Dari hasil penelitian terlihat bahwa 7,4 % menyatakan sangat setuju, 28,4 % menyatakan setuju, 32,1 % menyatakan tidak setuju dan 32,1 % menyatakan sangat tidak setuju bahwa mereka paham isi Perda No. 11/2000. Interpretasi dari data tersebut adalah bahwa lebih banyak responden yang belum paham isi Perda No.11/ 2000 daripada yang sudah paham isi Perda tersebut. Dibuktikan dengan 64,2 % responden menyatakan tidak paham terhadap Perda No.11/ 2000, hal ini berarti usaha pemerintah untuk mensosialisasikan Perda No. 11/2000 harus lebih ditingkatkan lagi. Data yang selengkapnya terlihat pada tabel IV.28 berikut ini.

Tabel IV.28.

Paham Isi Perda No. 11/2000

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	6	7.4
2	Setuju	23	28.4
3	Tidak Setuju	26	32.1
4	Sangat Tidak Setuju	26	32.1
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 22

Usaha pemerintah untuk membina dan memberi penyuluhan, akan terlihat dampaknya terlihat dari hasil penelitian bahwa 9,9 % menyatakan sangat setuju, 21 % menyatakan setuju, 34,6 % menyatakan tidak setuju dan 34,6 % menyatakan sangat tidak setuju bahwa pembinaan dan penyuluhan menambah ketaatan pada Perda No. 11/2000. Hal ini berarti bahwa responden menganggap bahwa pembinaan dan penyuluhan tidak banyak berarti pada ketaatan mereka terhadap Perda No. 11/2000, karena 65,2 % responden menyatakan tidak setuju terhadap pertanyaan tersebut. Implikasi bagi pemerintah kota adalah hendaknya pemerintah mencari alternatif baru untuk meningkatkan ketaatan mereka pada Perda No. 11/2000, seperti misalnya diadakan lomba-lomba antar PKL atau menggandeng pihak sponsor untuk mempercantik kios-kios PKL tersebut.

Tabel IV.29

Pembinaan dan Penyuluhan Menambah Ketaatan pada Perda No. 11/2000

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	8	9.9
2	Setuju	17	21.0
3	Tidak Setuju	28	34.6
4	Sangat Tidak Setuju	28	34.6
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 23

Pertanyaan ini menguji keinginan responden terhadap retribusi yang ditarik oleh pemerintah daerah. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 11,1 % menyatakan sangat setuju, 22,2 % menyatakan setuju, 37 % menyatakan tidak setuju dan 29,6 % menyatakan sangat tidak setuju bahwa setiap usaha PKL wajib membayar retribusi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak responden yang berkeinginan untuk tidak wajib membayar retribusi, alasannya retribusi bagi mereka mengurangi pendapatan setiap hari. Meskipun ada beberapa yang menyatakan setuju dengan alasan retribusi tersebut mereka anggap sebagai uang sewa yang dibayarkan pada pemerintah kota. Data yang lebih lengkap dapat dilihat pada tabel IV.30.

Tabel IV.30.

Setiap Usaha PKL Wajib Membayar Retribusi

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	9	11.1
2	Setuju	18	22.2
3	Tidak Setuju	30	37.0
4	Sangat Tidak Setuju	24	29.6
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 24

Pertanyaan ini sehubungan dengan adanya larangan dalam Perda No. 11/ 2000 untuk tidak berjualan di atas trotoar, bagaimana pendapat responden terhadap pertanyaan ini. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 11,1 % menyatakan sangat setuju, 28,4 % menyatakan setuju, 24,7 % menyatakan tidak setuju dan 35,8 % menyatakan sangat tidak setuju bahwa PKL di trotoar adalah pelanggaran Perda No. 11/2000. Data ini berarti sebagian besar responden (60,5 %) berpendapat bahwa berjualan trotoar bukan pelanggaran Perda No. 11/2000, alasan mereka trotoar adalah satu-satunya tempat yang bisa mereka gunakan untuk usaha. Ini

juga menunjukkan ketidak pahaman mereka pada Perda No. 11/ 2000.

Data yang lebih lengkap dapat dilihat pada tabel IV.31.

Tabel IV.31.

PKL di Trotoar Melanggar Perda No. 11/2000

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	9	11.1
2	Setuju	23	28.4
3	Tidak Setuju	20	24.7
4	Sangat Tidak Setuju	29	35.8
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 25

Dalam penelitian ini responden juga dimintai pendapat tentang pernyataan mendirikan tempat usaha di tempat larangan mengganggu keindahan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 16 % menyatakan sangat setuju, 11,1 % menyatakan setuju, 38,3 % menyatakan tidak setuju dan 34,6 % menyatakan sangat tidak setuju bahwa mendirikan tempat usaha di tempat larangan mengganggu keindahan. Data tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak responden yang berpendapat bahwa mendirikan usaha di tempat larangan tidak mengganggu keindahan selama tempat usaha mereka tertata dengan rapi dan selalu terlihat bersih. Meskipun tak jarang dijumpai PKL yang berada di tempat larangan justru kumuh, tidak tertata dan kotor. Data yang lebih lengkap dapat dilihat pada tabel IV.32.

Tabel IV.32.

Mendirikan Tempat Usaha di Tempat Larangan Mengganggu Keindahan

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	13	16.0
2	Setuju	9	11.1
3	Tidak Setuju	31	38.3
4	Sangat Tidak Setuju	28	34.6
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 26

Untuk pertanyaan ini diujikan pemahaman responden tentang kontribusinya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan usaha. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 12,3 % menyatakan sangat setuju, 22,2 % menyatakan setuju, 32,1 % menyatakan tidak setuju dan 33,3 % menyatakan sangat tidak setuju bahwa PKL berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan usaha. Hal ini berarti bahwa responden belum memiliki pemahaman tentang kontribusinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan usaha, ini ditunjukkan dengan sebagian besar responden (65,4 %) menyatakan tidak setuju bahwa PKL berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan usahanya. Data yang lebih lengkap dapat dilihat pada tabel IV.33.

Tabel IV.33.

Berkewajiban Menjaga Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Usaha

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	10	12.3
2	Setuju	18	22.2
3	Tidak Setuju	26	32.1
4	Sangat Tidak Setuju	27	33.3
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 27

Pertanyaan ini menguji pemahaman responden tentang kewajiban mereka menjaga kebersihan lingkungan usaha. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 13,6 % menyatakan sangat setuju, 22,2 % menyatakan setuju, 32,1 % menyatakan tidak setuju dan 32,1 % menyatakan sangat tidak setuju bahwa setiap usaha PKL wajib menjaga kebersihan lingkungan usaha. Data tersebut menunjukkan bahwa 64,2 % responden justru tidak setuju bahwa mereka berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan usaha. Sebab menurut mereka retribusi yang mereka bayarkan termasuk di dalamnya adalah uang kebersihan, jadi

pemerintahlah yang memiliki kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini patut menjadi perhatian bagi pemerintah untuk membenarkan persepsi PKL ini, karena kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Data ini dapat dilihat pada tabel IV.34.

Tabel IV.34.

Berkewajiban Menjaga Kebersihan Lingkungan Usaha

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	11	13.6
2	Setuju	18	22.2
3	Tidak Setuju	26	32.1
4	Sangat Tidak Setuju	26	32.1
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 28

Pertanyaan ini merupakan uji kepehaman responden pada pemahaman tentang kelestarian lingkungan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 19,8% menyatakan sangat paham, 16 % menyatakan paham, 28,4 % menyatakan tidak paham dan 35,8 % menyatakan sangat tidak paham terhadap larangan berjualan merupakan usaha menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa responden masih belum memahami pentingnya kelestarian lingkungan, dan menganggap larangan tersebut dibuat-buat oleh pemerintah untuk mencari alasan ditariknya retribusi. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel IV.35.

Tabel IV.35

Larangan Berjualan Di Tempat Tertarung

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sangat Paham	16	19.8
2	Paham	13	16.0
3	Tidak Paham	23	28.4
4	Sangat Tidak Paham	29	35.8
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 29

A.5. KARAKTERISTIK LINGKUNGAN PKL

Indikator keempat untuk mengetahui perilaku PKL adalah karakteristik lingkungan PKL. Untuk itu perlu diuji secara mendetail kondisi lingkungan usaha PKL. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 13,6 % menyatakan sangat kotor, 14,8 % menyatakan kotor, 35,8 % menyatakan bersih dan 35,8 % menyatakan bersih sekali terhadap kondisi lingkungan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa PKL telah memiliki kesadaran tentang kondisi lingkungan usahanya, atau dimungkinkan mereka belajar dari pengalaman bahwa konsumen hanya mau berbelanja di tempat yang bersih sehingga untuk menarik konsumen mereka harus menjaga tempat usahanya agar tampak selalu bersih. Dengan demikian jelas bahwa kondisi lingkungan yang bersih dapat mempengaruhi perilaku PKL untuk menjaga kebersihan di sekitarnya. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel IV.36.

Tabel IV.36.

Kondisi Lingkungan Usaha

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sangat Kotor	11	13.6
2	Kotor	12	14.8
3	Bersih	29	35.8
4	Bersih Sekali	29	35.8
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 30

Dari hasil penelitian pada tabel IV.37 diketahui bahwa 13,6 % responden menyatakan sangat setuju, 24,7 % menyatakan setuju, 34,6 % menyatakan tidak setuju dan 27,2 % menyatakan sangat tidak setuju bahwa PKL di atas saluran air merusak lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar PKL (61,8 %) berpendapat bahwa PKL di atas saluran air tidak merusak lingkungan selama sampah yang

dihasilkan tidak dibuang ke dalam saluran air. Namun pada prakteknya tetap banyak PKL yang membuang sampah ke dalam saluran air, ini tentu saja sangat berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Data ini dapat dilihat pada tabel IV.37.

Tabel IV.37.

PKL di atas Saluran Air Merusak Lingkungan

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	11	13.6
2	Setuju	20	24.7
3	Tidak Setuju	28	34.6
4	Sangat Tidak Setuju	22	27.2
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 31

Dari hasil penelitian pada tabel IV.38 diketahui bahwa 14,8 % responden menyatakan sangat setuju, 17,3 % responden menyatakan setuju, 29,6 % responden menyatakan tidak setuju dan 38,3 % responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa keamanan dan ketertiban lingkungan tidak perlu dikhawatirkan. Dengan demikian sebagian besar responden tampaknya mengkhawatirkan keamanan dan ketertiban lingkungannya terutama terhadap ulah warga di sekitarnya seperti di dekat sekolah yang sering tawuran, sementara di lokasi yang sepi mereka sering dipungut oleh pungutan liar dari para preman. Kekhawatiran ini dapat mempengaruhi perilaku PKL yang negatif terhadap Perda No.11/2000.

Tabel IV.38.

Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Tidak Perlu Dikhawatirkan

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	12	14.8
2	Setuju	14	17.3
3	Tidak Setuju	24	29.6
4	Sangat Tidak Setuju	31	38.3
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 32

Dari hasil penelitian pada tabel IV.39 dapat diketahui bahwa 12,3 % responden menyatakan sangat setuju, 19,8 % responden menyatakan setuju, 25,9 % responden menyatakan tidak setuju dan 42 % responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa lingkungan cocok untuk usaha. Hal ini beralasan mengingat tempat usaha mereka tampaknya agak memaksakan diri seperti menyempil di sudut jalan, di atas saluran air, di pinggir taman, di sudut gedung instansi kantor, sekolah, dan rumah warga serta seenaknya mendirikan tempat usaha di trotoar.

Dari data tersebut sebenarnya dapat diketahui bahwa dengan lingkungan yang tidak cocok untuk usaha tersebut maka dapat diupayakan agar para PKL yang melanggar peruntukan lahan seperti dalam Perda No.11.2000 agar memindahkan lokasi usahanya ke tempat lain.

Tabel IV.39.

Lingkungan Cocok Untuk Usaha

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	10	12.3
2	Setuju	16	19.8
3	Tidak Setuju	21	25.9
4	Sangat Tidak Setuju	34	42.0
	Total	81	100.0

Sumber : Kuesioner No. 33

Dari hasil penelitian pada tabel IV.40 di bawah ini diketahui bahwa 14,8 % responden menyatakan sangat setuju, 8,6 % responden menyatakan setuju, 40,7 % responden menyatakan tidak setuju dan 35,8 % responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa situasi lalu lintas rawan kecelakaan. Hal ini menyatakan bahwa lingkungan di sekitar PKL cukup lancar dan aman arus lalu lintasnya. Kondisi lalu lintas yang lancar dan tertib ini diharapkan mempengaruhi perilaku PKL dalam mendukung Perda No.11/2000.

Tabel IV.40.

Situasi Lalu Lintas Rawan Kecelakaan

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	12	14,8
2	Setuju	7	8,6
3	Tidak Setuju	33	40,7
4	Sangat Tidak Setuju	29	35,8
	Total	81	100,0

Sumber : Kuesioner No.34

Dari hasil penelitian pada tabel IV.41 di bawah ini diketahui bahwa 11,1 % responden menyatakan sangat setuju, 23,5 % responden menyatakan setuju, 37 % responden menyatakan tidak setuju dan 28,4 % responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa kondisi tempat usaha rawan kejahatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi lingkungan PKL tersebut cukup aman dan berpengaruh terhadap perilaku PKL yang diharapkan dapat mendukung Perda No.11/2000.

Tabel IV.41.

Kondisi Tempat Usaha Rawan Kejahatan

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sangat Rawan	9	11,1
2	Rawan	19	23,5
3	Tidak Rawan	30	37,0
4	Tidak Pernah Terjadi Kejahatan	23	28,4
	Total	81	100,0

Sumber : Kuesioner No. 35

Dari hasil penelitian pada tabel IV.42 di bawah ini diketahui bahwa 18,5 % responden menyatakan sikap warga sangat ramah, 13,6 % responden menyatakan ramah, 22,2 % responden menyatakan tidak ramah dan 45,7 % responden menyatakan sangat tidak ramah terhadap sikap warga pada PKL.. Melihat hasil tersebut tampaknya banyak warga di sekitar PKL bersikap tidak ramah di beberapa lokasi tertentu, hal ini disebabkan karena lokasi usaha PKL terletak tepat di depan rumah warga, toko

sehingga sikap warga di sekitarnya menjadi dingin dan apatis terhadap keberadaan PKL. Hal ini menunjukkan bahwa responden beranggapan bahwa masyarakat kurang bisa menerima keberadaan mereka di lokasi usaha, kemungkinan karena dampak negatif yang mereka hasilkan, seperti sampah dan kebisingan. Dengan demikian akan menjadikan PKL cenderung berperilaku apatis terhadap Perda No.11/2000 karena warga di sekitarnya tampak tidak peduli.

Tabel IV.42.

Sikap Warga Terhadap PKL

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1	Sangat Ramah	15	18.5
2	Ramah	11	13.6
3	Tidak Ramah	18	22.2
4	Sangat Tidak Ramah	37	45.7
	Total	81	100.0

Sumber.: Kuesioner No. 36

B. ANALISIS HASIL PENELITIAN

Analisis hasil penelitian ini akan dititik beratkan pada pembahasan uji validitas dan reliabilitas serta hubungan antara dua variabel dan hubungan secara bersama-sama.

B.1. UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Agar hasil analisis lebih lengkap dan akurat di bawah ini disajikan hasil uji validitas dan reliabilitas. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah item-item dalam instrumen yang diajukan kepada responden dalam melakukan penelitian yang dilakukan sudah tepat dan akurat guna mengukur variabel penelitian. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas telah menunjukkan bahwa semua item dinyatakan valid dan

reliabel. Hal ini dapat dilihat dengan berdasarkan pada kaidah, apabila nilai corrected item total correlation serta nilai Alpha positif dan $> r$ tabel maka variabel tersebut valid dan reliabel tetapi jika nilai corrected item total correlation serta Alpha tidak positif dan atau $< r$ tabel maka variabel tersebut tidak valid dan tidak reliabel. Sedangkan untuk data yang dipakai dalam penelitian ini nilai r tabel didapatkan = 0,219 dan semua nilai r hitung dan nilai alpha (dalam lampiran) $>$ dari nilai r tabel tersebut, maka semua data yang digunakan valid dan reliabel. Untuk mengetahui secara lebih detail dapat dilihat pada daftar uji validitas dan reliabilitas dalam lampiran penelitian ini.

B.2. KATEGORISASI VARIABEL PENELITIAN

Berdasarkan dan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dideskripsikan/ disajikan dalam data dan masing-masing pertanyaan telah memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kondisi, baik variabel tergantung maupun variabel bebas yang diteliti. Selanjutnya untuk melakukan uji hipotesis, perlu dilakukan kategorisasi yang berdasarkan skor masing-masing responden yang diteliti. Dalam penelitian ini telah diajukan tiga variabel bebas yaitu karakteristik PKL, pemahaman Perda No. 11/ 2000 dan karakteristik lingkungan PKL, sedangkan variabel terikatnya adalah perilaku PKL. Untuk menyusun kategori tersebut maka digunakan rumus

$$I = \frac{R}{K}$$

Dimana:

- I = interval Kelas
- R = skor tertinggi - skor terendah
- K = jumlah kelas

1. PERILAKU PKL

Hasil penelitian yang telah dilakukan yang mewakili variabel perilaku PKL terdapat 10 pertanyaan, dan 10 pertanyaan tersebut akan dilihat nilai tertinggi dan nilai terendah dan selanjutnya akan dibuat menjadi 4 (empat) kategori. Apabila nilai ini disebar pada 4 kategori maka hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. IV.43
Kategorisasi Variabel Perilaku PKL

No.	Keterangan	Responden	Persentase
1	Sangat Baik	10	12.3
2	Baik	25	30.9
3	Tidak Baik	40	49.4
4	Sangat Tidak Baik	6	7.4
		81	100.0

Sumber : Data yang diolah, 2002

Hasil penelitian terhadap perilaku PKL menunjukkan bahwa terdapat 12,3 % yang menyatakan bahwa perilaku PKL ternyata sangat baik, sedangkan 30,9 % menyatakan bahwa perilaku mereka baik kemudian 49,4 % menyatakan bahwa perilaku PKL tidak baik sementara 7,4 % menyatakan bahwa perilaku PKL sangat tidak baik. Dari distribusi di atas dapat diinterpretasikan bahwa terdapat 56,8 % bahwa perilaku PKL masuk dalam kategori tidak baik.

2. KARAKTERISTIK PKL

Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam kuesioner yang mewakili variabel karakteristik PKL terdapat 11 pertanyaan. Dari 11 pertanyaan tersebut akan dilihat nilai tertinggi dan nilai terendah. Selanjutnya akan dibuat menjadi 4 (empat) kategori.

Apabila nilai ini disebar pada 4 kategori maka hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. IV.44
Kategorisasi Variabel Karakteristik PKL

No.	Keterangan	Responden	Persentase
1	Sangat Baik	4	4.9
2	Baik	19	23.5
3	Tidak Baik	47	58.0
4	Sangat Tidak Baik	11	13.6
		81	100.0

Sumber : Data yang diolah, 2002

Dalam hasil penelitian terhadap karakteristik PKL, menunjukkan bahwa terdapat 4,9 % yang menyatakan bahwa karakteristik PKL ternyata sangat baik, sedangkan 23,5 % menyatakan bahwa karakteristik mereka Baik kemudian 58 % menyatakan bahwa karakteristik PKL tidak baik sementara 13,6 % menyatakan bahwa karakteristik PKL sangat tidak baik. Dan distribusi di atas dapat diinterpretasikan bahwa terdapat 72,6 % bahwa karakteristik PKL masuk dalam kategori tidak baik.

3. PEMAHAMAN PERDA NO. 11/2000

Hasil penelitian yang mewakili variabel pemahaman Perda No. 11/2000 terdapat 8 pertanyaan. Dari 8 pertanyaan tersebut akan dilihat nilai tertinggi dan nilai terendah dan selanjutnya akan dibuat menjadi 4 (empat) kategori. Apabila nilai ini disebar pada 4 kategori maka hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. IV.45

Kategorisasi Variabel Pemahaman Terhadap Perda No. 11/2000

No.	Keterangan	Responden	Persentase
1	Sangat Baik	7	8.6
2	Baik	11	13.6
3	Rendah	47	58.0
4	Sangat Rendah	16	19.8
		81	100.0

Sumber : Data yang diolah, 2002

Hasil penelitian terhadap pemahaman Perda No. 11/2000 menunjukkan bahwa terdapat 8,6 % responden yang menyatakan bahwa pemahaman mereka ternyata sangat baik, sedangkan 13,6 % menyatakan bahwa pemahaman mereka baik kemudian 58 % menyatakan bahwa pemahaman Perda No. 11/2000 rendah sementara 19,8 % menyatakan bahwa pemahaman mereka sangat rendah. Dari distribusi di atas dapat diinterpretasikan bahwa terdapat 77,8 % pemahaman Perda No. 11/2000 yang termasuk dalam kategori rendah.

3. KARAKTERISTIK LINGKUNGAN PKL

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dalam kuesioner yang mewakili variabel karakteristik lingkungan PKL terdapat 7 pertanyaan, dan 7 pertanyaan tersebut akan dilihat nilai tertinggi dan nilai terendah. Selanjutnya akan dibuat menjadi 4 (empat) kategori. Apabila nilai ini disebar pada 4 kategori maka hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. IV.46

Kategorisasi Variabel Karakteristik Lingkungan PKL

No.	Keterangan	Responden	Persentase
1	Sangat Baik	7	8.6
2	Baik	9	11.1
3	Tidak Baik	48	59.3
4	Sangat Tidak Baik	17	21.0
		81	100.0

Sumber : Data yang diolah, 2002

Dari hasil penelitian terhadap karakteristik lingkungan PKL menunjukkan bahwa terdapat 8,6 % yang menyatakan bahwa karakteristik lingkungan PKL ternyata sangat baik, sedangkan 11,1 % menyatakan bahwa karakteristik lingkungan mereka baik kemudian 59,3 % menyatakan bahwa karakteristik lingkungan PKL tidak baik sementara 21 % menyatakan bahwa karakteristik lingkungan PKL sangat tidak baik. Dari distribusi di atas dapat diinterpretasikan bahwa terdapat 80,3 % bahwa karakteristik lingkungan PKL masuk dalam kategori tidak baik.

B.3. HUBUNGAN ANTAR VARIABEL PENELITIAN DENGAN CROSSTAB

Setelah uji validitas dan reliabilitas dilakukan dan telah memenuhi syarat untuk dilakukan Uji Non Parametrik Rank Kendall, untuk memperjelas hubungan antar variabel penelitian yaitu antara variabel bebas dan variabel terikat digunakan tabel silang yang dihitung dengan menggunakan crosstabulations dari program SPSS.

1. HUBUNGAN KARAKTERISTIK PKL DENGAN PERILAKU PKL

Dari hasil pengujian hubungan antara karakteristik PKL dengan perilaku PKL telah terbukti bahwa keduanya mempunyai hubungan yang kuat. Hal

ini dapat ditunjukkan bahwa dari jumlah 81 responden ternyata 74,5 % responden menyatakan bahwa karakteristik PKL tidak baik akan menyebabkan perilaku PKL yang tidak baik. Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat 68,4 % responden menyatakan bahwa karakteristik PKL yang baik akan menyebabkan perilaku PKL yang baik pula. Berdasarkan tabel silang diketahui bahwa terdapat 23,4 % yang menyatakan karakteristik PKL yang tidak baik akan menghasilkan perilaku PKL yang baik. Dengan berdasar pada hasil pengamatan di lapangan, kondisi ini dimungkinkan terjadi karena terdapat beberapa faktor yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar variabel karakteristik PKL, misalnya rasa setia kawan antar sesama PKL. Untuk mengetahui secara detail dapat dilihat pada tabel IV.47 berikut ini.

Tabel IV. 47

Crosstabulation Hubungan Karakteristik.PKL dengan Perilaku PKL

PERILAKU PKL	KARAKTERISTIK PKL				Total
	Sangat Baik	Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak baik	
Sangat Baik	4	5	1		10
	100.0 %	26.3 %	2.1 %		12.3 %
Baik		13	11	1	25
		68.4 %	23.4 %	9.1 %	30.9 %
Tidak Baik		1	35	4	40
		5.3 %	74.5 %	36.4 %	49.9 %
Sangat Tidak baik				6	6
				54.5 %	7.4 %
Total	4	19	47	11	81
	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0%

Sumber : Lampiran 6

Untuk mengetahui derajat signifikansi pada taraf 95 % bahwa harga tabel adalah 1,96 sedangkan dari hasil perhitungan Z Score didapat koefisien sebesar 3,268484637, hasil ini membuktikan bahwa Z hitung lebih besar daripada Z tabel

(3,268484637 \geq 1,96). Dengan demikian hasil ini dapat dimaknai bahwa terdapat hubungan antara karakteristik PKL dengan perilaku PKL. Tabel berikut menunjukkan hasil perhitungan secara lebih detail.

Tabel IV. 48

Signifikansi Z-Score

Keterangan	Nilai
Kendall	0,711
Penyebut	0,217532
Harga Z hitung	3,268484637
Harga Z tabel (95 %)	1,96

Sumber : Data yang diolah

2. HUBUNGAN PEMAHAMAN PERDA NO. 11/2000 DENGAN PERILAKU PKL

Dari hasil pengujian hubungan antara pemahaman Perda No. 11/2000 dengan perilaku PKL telah terbukti bahwa keduanya mempunyai hubungan yang lemah. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa dari jumlah 81 responden ternyata 57,4 % responden menyatakan bahwa pemahaman Perda No. 11/2000 rendah akan menyebabkan perilaku PKL yang tidak baik. Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat 45,5 % responden menyatakan bahwa pemahaman Perda No. 11/2000 yang baik akan menyebabkan perilaku PKL yang baik pula. Berdasarkan tabel silang diketahui bahwa masih terdapat 29,8 % yang menyatakan pemahaman yang tidak baik akan menghasilkan perilaku PKL yang baik. Besarnya bias ini membuktikan lemahnya hubungan antara pemahaman Perda No. 11/2000 dengan perilaku PKL. Untuk mengetahui secara detail dapat dilihat pada tabel IV.49 berikut ini.

Tabel IV. 49

Crosstabs Hubungan Pemahaman Perda No. 11/2000 dengan Perilaku PKL

PERILAKU PKL	PEMAHAMAN PERDA NO. 11/2000				Total
	Sangat Baik	Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak baik	
Sangat Baik	5	2	3		10
	71.4 %	18.2 %	6.4 %		12.3 %
Baik	2	5	14	4	25
	28.6 %	45.5 %	29.8 %	25.0 %	30.9 %
Rendah		4	27	9	40
		36.4 %	57.4 %	56.3 %	49.4 %
Sangat Rendah			3	3	6
			6.4 %	18.8 %	7.4 %
Total	7	11	47	11	81
	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %

Sumber : Lampiran 6

Untuk mengetahui derajat signifikansi pada taraf 95 % bahwa harga tabel adalah 1,96 sedangkan dari hasil perhitungan Z score didapat koefisien sebesar 1,88478017, hasil ini membuktikan bahwa Z hitung lebih kecil daripada Z tabel ($1,88478017 \leq 1,96$). Dengan demikian hasil ini dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang lemah antara variabel pemahaman Perda No. 11/2000 dengan perilaku PKL. Tabel IV.50 berikut menunjukkan hasil perhitungan secara lebih detail.

Tabel IV. 50

Signifikansi Z-Score

Keterangan	Nilai
Kendall	0,410
Penyebut	0,217532
Harga Z hitung	1,88478017
Harga Z tabel (95 %)	1,96

Sumber : Data yang diolah

3. HUBUNGAN KARAKTERISTIK LINGKUNGAN PKL DENGAN PERILAKU PKL

Dari hasil pengujian hubungan antara karakteristik lingkungan PKL dengan perilaku PKL telah terbukti bahwa keduanya mempunyai hubungan yang kuat. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa dari jumlah 81 responden ternyata 56,3 % responden menyatakan bahwa karakteristik lingkungan PKL tidak baik akan menyebabkan perilaku PKL yang tidak baik. Ini juga dikuatkan dengan pendapat 55,6 % responden menyatakan bahwa karakteristik lingkungan PKL yang baik akan menyebabkan perilaku PKL yang baik pula. Berdasarkan tabel silang diketahui bahwa terdapat 5,9 % yang menyatakan pemahaman yang sangat tidak baik akan menghasilkan perilaku PKL yang sangat baik. Hal ini lebih dikarenakan faktor di luar karakteristik lingkungan PKL, seperti misalnya sifat masing-masing individu PKL. Untuk mengetahui secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV. 51

Crosstabs Hubungan Karakteristik Lingkungan PKL dengan Perilaku PKL

PERILAKU PKL	KARAKTERISTIK LINGKUNGAN PKL				Total
	Sangat Baik	Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak baik	
Sangat Baik	5	3	1	1	10
	71.4 %	33.3 %	2.1%	5.9 %	12.3 %
Baik	2	5	17	1	25
	28.6 %	55.6 %	35.4 %	5.9 %	30.9 %
Tidak Baik		1	27	12	40
		11.1%	56.3 %	70.6 %	49.4 %
Sangat Tidak Baik			3	3	6
			6.3 %	17.6 %	7.4 %
Total	7	9	47	11	81
	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0%

Sumber : Lampiran 6

Untuk mengetahui derajat signifikansi pada taraf 95 % bahwa harga tabel adalah 1,96 sedangkan dari hasil perhitungan Z score didapat koefisien sebesar 2,418035048, hasil ini membuktikan bahwa Z hitung lebih besar daripada Z tabel ($2,418035048 \geq 1,96$). Dengan demikian hasil ini dapat dimaknai bahwa terdapat hubungan antara variabel karakteristik lingkungan PKL dengan perilaku PKL. Tabel berikut menunjukkan hasil perhitungan secara lebih detail.

Tabel IV. 52
Signifikansi Z-Score

Keterangan	Nilai
Kendall	0,526
Penyebut	0,217532
Harga Z hitung	2,418035048
Harga Z tabel (95 %)	1,96

Sumber : Data yang diolah

C. HUBUNGAN ANTAR VARIABEL DENGAN KENDALL'S TAU_B

Untuk menguji hipotesis digunakan data nominal dari hasil jawaban responden penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan rumus Rank Kendall yang dikerjakan dengan program SPSS. Hasil perhitungan dapat terlihat pada tabel-tabel dibawah ini.

C.1. HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK PKL DENGAN PERILAKU PKL

Dari hasil perhitungan statistik rank Kendall non parametric correlation diperoleh hasil adanya korelasi antara karakteristik PKL dengan perilaku PKL. Hal tersebut sama dengan hasil perhitungan tabel silang yang telah dikemukakan di depan. Koefisien korelasi 0,544, yang dalam perhitungan tabel silang menghasilkan angka 0,434 jadi terdapat korelasi. Hasil perhitungan dengan program SPSS ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel IV. 53

Correlations Hubungan antara Karakteristik PKL dengan Perilaku PKL

		PERILAKU PKL	KARAKTERISTIK PKL
Kendall's tau_b	PERILAKU PKL	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.544**
		N	.000
	KARAKTERISTIK PKL	Correlation Coefficient	.544**
		Sig. (2-tailed)	1.000
		N	.000
			81
			81

** Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

C.2. HUBUNGAN ANTARA PEMAHAMAN PERDA NO.11/2000 DENGAN PERILAKU PKL

Dari hasil perhitungan statistik rank Kendall non parametric correlation diperoleh hasil tidak adanya korelasi antara pemahaman Perda No. 11/2000 dengan perilaku PKL. Hal tersebut sama dengan hasil perhitungan tabel silang yang telah dikemukakan di depan. Koefisien korelasi 0,160, yang dalam perhitungan tabel silang menghasikan angka 0,147 jadi tidak terdapat korelasi. Hasil perhitungan dengan program SPSS ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel IV. 54

Correlations

Hubungan antara Pemahaman Perda No.11/2000 dengan Perilaku PKL

		PERILAKU PKL	PEMAHAMAN PERDA NO.11/2000
Kendall's tau_b	PERILAKU PKL	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.160
		N	.054
	PEMAHAMAN PERDA NO.11/2000	Correlation Coefficient	.160
		Sig. (2-tailed)	1.000
		N	.054
			81
			81

C.3. HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK LINGKUNGAN PKL DENGAN PERILAKU PKL

Dari hasil perhitungan statistik rank Kendall non parametric correlation diperoleh hasil adanya korelasi antara karakteristik lingkungan PKL dengan perilaku PKL. Hal tersebut sama dengan hasil perhitungan tabel silang yang telah dikemukakan di depan. Koefisien korelasi 0,476, yang dalam perhitungan tabel silang menghasilkan angka 0,483 jadi terdapat korelasi. Hasil perhitungan dengan program SPSS ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel IV. 55

Correlations
Hubungan antara Karakteristik Lingkungan PKL dengan Perilaku PKL

		PERILAKU PKL	KARAKTERISTIK LINGKUNGAN PKL
Kendall's tau_b	PERILAKU PKL	Correlation Coefficient	.476**
		Sig. (2-tailed)	.000
	KARAKTERISTIK LINGKUNGAN PKL	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000
		N	81

** Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

C.4. HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK PKL, PEMAHAMAN PERDA NO.11/ 2000 DAN KARAKTERISTIK LINGKUNGAN PKL DENGAN PERILAKU PKL

Dari hasil perhitungan rank Kendall untuk ketiga variabel yaitu variabel karakteristik PKL, Pemahaman Perda No. 11/ 2000 dan karakteristik lingkungan PKL terhadap perilaku PKL ternyata ada hubungan yang signifikan pada taraf uji 5 % dimana hubungan terkuat adalah variabel

Karakteristik PKL dengan Perilaku PKL. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel IV.56.

Correlations
 Hubungan antara Karakteristik PKL, Pemahaman Perda No.11/ 2000 dan Karakteristik Lingkungan PKL dengan Perilaku PKL

			PERILAKU PKL	KARAKTERISTIK PKL	PEMAHAMAN PERDA NO.11/2000	KARAKTERISTIK LINGKUNGAN PKL
Kendall's tau_b	PERILAKU PKL	Correlation Coefficient	1.000	.544**	.160	.476**
		Sig. (2- tailed)	.	.000	.054	.000
		N	81	81	81	81
	KARAKTER ISTIK PKL	Correlation Coefficient	.544**	1.000	.074	.200**
		Sig. (2- tailed)	.000	.	.373	.018
		N	81	81	81	81
	PEMAHAM AN PERDA NO.11/2000	Correlation Coefficient	.160	.074	1.000	.268**
		Sig. (2- tailed)	.054	.373	.	.001
		N	81	81	81	81
	KARAKTER ISTIK LINGKUN GAN PKL	Correlation Coefficient	.476**	.200**	.268**	1.000
		Sig. (2- tailed)	.000	.018	.001	.
		N	81	81	81	81

** Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).

Dari hasil koefisien uji konkordansi Kendall adalah 0,108, sedangkan Chi Square tabel untuk tingkat signifikansi 95 % adalah sebesar 7,815 dan degree of freedom (df = 3). Hasil hitung uji signifikansi Chi Square adalah 26,186 sehingga Chi Square hitung lebih besar dari Chi Square tabel (χ^2 hitung > χ^2 tabel). Dari hasil uji korelasi konkordansi Kendall tersebut telah dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan bersama-sama antara variabel karakteristik PKL, pemahaman Perda No. 11/ 2000 dan karakteristik lingkungan PKL. Untuk lebih jelasnya dapat ditunjukkan tabel konkordansi Kendall tersebut di bawah ini :

Tabel IV.57.

Koefisien Konkordansi Kendall's
Hubungan Antara Karakteristik PKL, Pemahaman Perda No. 11/2000 dan
Karakteristik Lingkungan PKL dengan Perilaku PKL
(Hubungan Konkordansi Kendall)

N	81
Kendall's Konkordansi (W)	0,108
Chi-Square hitung	26,186
Chi-Square tabel (95 %)	7,815
Df	3
Asymp. Sig	0,000

a. Kendall's Coefficient of Concordance

Sumber : Lampiran 7

D. DISKUSI

Dari hasil pengujian hubungan antara karakteristik PKL dengan perilaku PKL telah terbukti bahwa keduanya mempunyai hubungan yang kuat. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa dari jumlah 81 responden ternyata 74,5 % responden menyatakan bahwa karakteristik PKL tidak baik akan menyebabkan perilaku PKL yang tidak baik. Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat 68,4 % responden menyatakan bahwa karakteristik PKL yang baik akan menyebabkan perilaku PKL yang baik pula. Berdasarkan tabel silang diketahui bahwa terdapat 23,4 % yang menyatakan karakteristik PKL yang tidak baik akan menghasilkan perilaku PKL yang baik. Dengan berdasar pada hasil pengamatan di lapangan, kondisi ini dimungkinkan terjadi karena terdapat beberapa faktor yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar variabel karakteristik PKL, misalnya rasa setia kawan antar sesama PKL

Hal ini dapat pula dibuktikan dengan analisis kualitatif, antara lain 86,4 % responden memiliki kemauan untuk menjaga keamanan dan ketertiban terutama di lokasi usahanya masing-masing (Lihat tabel IV.11). Demikian pula dengan kewajiban membayar retribusi, meskipun dengan kesadaran yang terpaksa tetapi

para PKL tetap membayar retribusi sesuai dengan ketentuan pemerintah kota (Lihat tabel IV.15). Dengan analisis kuantitatif ditunjukkan dengan angka rank Kendall yang menunjukkan 0,544 dengan signifikansi 0,000, lebih kecil dari nilai α yang ditetapkan yaitu 5 % (0,05). Hal itu dapat diasumsikan bahwa perilaku PKL sangat tergantung pada karakteristik PKL.

Dari hasil pengujian hubungan antara pemahaman Perda No. 11/2000 dengan perilaku PKL telah terbukti bahwa keduanya mempunyai hubungan yang lemah. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa dari jumlah 81 responden ternyata 57,4 % responden menyatakan bahwa pemahaman Perda No. 11/2000 rendah akan menyebabkan perilaku PKL yang tidak baik. Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat 45,5 % responden menyatakan bahwa pemahaman Perda No. 11/2000 yang baik akan menyebabkan perilaku PKL yang baik pula. Berdasarkan tabel silang diketahui bahwa masih terdapat 29,8 % yang menyatakan pemahaman yang tidak baik akan menghasilkan perilaku PKL yang baik.

Variabel pemahaman Perda No. 11/2000 ternyata memiliki hubungan yang lemah dengan perilaku PKL dapat pula dibuktikan dengan analisis kualitatif, antara lain 64,2 % responden yang menyatakan ketidak pahaman bahwa larangan berjualan merupakan usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan (Lihat tabel IV.35). Demikian pula pemahaman responden tentang Perda No. 11/ 2000 sebanyak 64,2 % responden menyatakan bahwa mereka tidak paham tentang Perda No.11/ 2000 tersebut (Lihat tabel IV.28). Dengan analisis kuantitatif ditunjukkan dengan angka rank Kendall yang menunjukkan 0,160 dengan signifikansi 0,054, lebih besar dari nilai α yang ditetapkan yaitu 5 % (0,05) meskipun tipis. Hal itu dapat diasumsikan bahwa perilaku PKL tidak tergantung pada pemahaman Perda No. 11/ 2000.

Dari hasil pengujian hubungan antara karakteristik lingkungan PKL dengan perilaku PKL telah terbukti bahwa keduanya mempunyai hubungan yang

kuat. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa dari jumlah 81 responden ternyata 56,3 % responden menyatakan bahwa karakteristik lingkungan PKL tidak baik akan menyebabkan perilaku PKL yang tidak baik. Ini juga dikuatkan dengan pendapat 55,6 % responden menyatakan bahwa karakteristik lingkungan PKL yang baik akan menyebabkan perilaku PKL yang baik pula.

Variabel karakteristik lingkungan PKL ternyata memiliki hubungan yang erat pula dengan perilaku PKL dapat pula dibuktikan dengan analisa kualitatif, antara lain 76,5 % responden menolak bahwa di lokasi usahanya sering terjadi kecelakaan lalu lintas (Lihat tabel IV.40). Demikian pula dengan penolakan responden atas pernyataan lokasi usahanya rawan kejahatan sebesar 65,4 % (Lihat tabel IV.41). Dengan analisa kuantitatif ditunjukkan dengan angka rank Kendall yang menunjukkan 0,476 dengan signifikansi 0,000, lebih kecil dari nilai α yang ditetapkan yaitu 5 % (0,05). Hal itu dapat diasumsikan bahwa perilaku PKL tergantung pada karakteristik lingkungan PKL.

Variabel karakteristik PKL, pemahaman Perda No. 11/2000 dan karakteristik lingkungan PKL ternyata memiliki hubungan dengan perilaku PKL. Hal ini ditunjukkan dengan uji konkordansi Kendall (Kendall's W), dimana diketahui nilai Kendall's W = 0,108 dengan Chi-Square hitung = 26,186 dan df = 3 sedangkan nilai Chi-Square tabel = 12,8381. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai Chi-Square hitung lebih besar dari Chi-Square tabel ($26,186 \geq 12,8381$), ini berarti semua variabel tergantung memiliki hubungan dengan perilaku PKL.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dari keseluruhan tesis ini, dimana peneliti akan menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Adapun kesimpulan dan rekomendasi/saran dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

Pengelolaan PKL di Semarang tidak lepas dari kebijakan publik yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang. Keberadaan PKL menjadi fenomenal, karena pada satu sisi seringkali sektor ini dianggap mengganggu ketertiban kota, namun pada sisi lain mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Karakteristik PKL menjadi salah satu hal yang perlu dicermati. Sebab pada aspek ini seringkali terjadi friksi sosial yang cukup rentan. Di samping itu, penting bagi Pemkot untuk selalu melakukan sosialisasi Perda berkaitan dengan PKL. Dalam hal ini Perda No.11/2000. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dengan data ordinal maupun nominal dan analisa kualitatif serta kuantitatif secara umum dapat ditarik kesimpulan :

Dari hasil pengujian hubungan antara karakteristik PKL dengan perilaku PKL telah terbukti bahwa keduanya mempunyai hubungan yang kuat. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa dari jumlah 81 responden ternyata 74,5 % responden menyatakan bahwa karakteristik PKL tidak baik akan menyebabkan perilaku PKL yang tidak baik. Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat 68,4 % responden menyatakan bahwa karakteristik PKL yang baik akan menyebabkan perilaku PKL yang baik pula.

Berdasarkan tabel silang diketahui bahwa terdapat 23,4 % yang menyatakan karakteristik PKL yang tidak baik akan menghasilkan perilaku PKL yang baik. Dengan berdasar pada hasil pengamatan di lapangan, kondisi ini dimungkinkan terjadi karena terdapat beberapa faktor yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar variabel karakteristik PKL, misalnya rasa setia kawan antar sesama PKL.

Hal ini dapat pula dibuktikan dengan analisis kualitatif, antara lain 86,4 % responden memiliki kemauan untuk menjaga keamanan dan ketertiban terutama di lokasi usahanya masing-masing (Lihat tabel IV.11). Demikian pula dengan kewajiban membayar retribusi, meskipun dengan kesadaran yang terpaksa tetapi para PKL tetap membayar retribusi sesuai dengan ketentuan pemerintah kota (Lihat tabel IV.15). Dari hasil pengujian hubungan antara pemahaman Perda No. 11/2000 dengan perilaku PKL telah terbukti bahwa keduanya mempunyai hubungan yang lemah. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa dari jumlah 81 responden ternyata 57,4 % responden menyatakan bahwa pemahaman Perda No. 11/2000 rendah akan menyebabkan perilaku PKL yang tidak baik. Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat 45,5 % responden menyatakan bahwa pemahaman Perda No. 11/2000 yang baik akan menyebabkan perilaku PKL yang baik pula. Berdasarkan tabel silang diketahui bahwa masih terdapat 29,8 % yang menyatakan pemahaman yang tidak baik akan menghasilkan perilaku PKL yang baik.

Variabel pemahaman Perda No. 11/2000 ternyata memiliki hubungan yang lemah dengan perilaku PKL dapat pula dibuktikan dengan analisis kualitatif, antara lain 64,2 % responden yang menyatakan ketidak pahaman bahwa larangan berjualan merupakan usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan (Lihat tabel IV.35). Demikian pula pemahaman responden tentang Perda No. 11/2000 sebanyak 64,2 % responden menyatakan bahwa mereka tidak paham tentang Perda No.11/2000

tersebut (Lihat tabel IV.28). Dengan analisis kuantitatif ditunjukkan dengan angka rank Kendall yang menunjukkan 0,160 dengan signifikansi 0,054, lebih besar dari nilai α yang ditetapkan yaitu 5 % (0,05) meskipun tipis. Hal itu dapat diasumsikan bahwa perilaku PKL cenderung tidak sesuai perda karena kurangnya pemahaman pada Perda No. 11/ 2000.

Dari hasil pengujian hubungan antara karakteristik lingkungan PKL dengan perilaku PKL telah terbukti bahwa keduanya mempunyai hubungan yang kuat. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa dari jumlah 81 responden ternyata 56,3 % responden menyatakan bahwa karakteristik lingkungan PKL tidak baik akan menyebabkan perilaku PKL yang tidak baik pula. Ini juga dikuatkan dengan pendapat 55,6 % responden menyatakan bahwa karakteristik lingkungan PKL yang baik akan menyebabkan perilaku PKL yang baik pula.

Setelah melihat kajian dari pembahasan di Bab IV dari hasil penelitian terhadap 81 responden PKL, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting seperti :

1. Perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah seperti telah dijelaskan dalam Bab IV antara lain dalam menjaga kebersihan masih cukup rendah. Selain itu sebagian besar responden (61,8 %) juga tetap bertahan di atas saluran air dan trotoar. Selebihnya perilaku mereka terhadap lalu lintas, kewajiban retribusi, menjaga keamanan dan ketertiban dapat dikatakan cukup baik dengan asumsi tidak ada gejala lainnya.
2. Karakteristik PKL di Kecamatan Semarang Tengah pada umumnya berpendidikan rendah dengan rata-rata usaha yang cukup lama, cenderung berjenis kelamin laki-laki dengan golongan usia yang merata serta modal usaha yang kecil. Hal ini jelas bahwa perilaku PKL di Kecamatan

Semarang Tengah tampak erat kaitannya dengan karakteristik PKL tersebut di mana perilaku mereka yang kurang dalam memahami Perda No.11/2000.

3. Secara deskriptif terdapat pengaruh yang kurang signifikan dari variabel pemahaman Perda No.11/2000 terhadap perilaku PKL di Semarang seperti terlihat dalam tabel IV.35 di Bab IV dimana pemahaman PKL terhadap perda tersebut rendah dengan indikasi 64,2 % responden tidak paham terhadap perda tersebut. Hal ini juga diperkuat bahwa sebagian besar responden (65,2 %) tidak merasa membutuhkan pembinaan dan penyuluhan yang intensif karena pemerintah kurang tegas dan kegiatan penyuluhan yang sudah ada tampaknya tidak diminati oleh responden. Selain itu karena kurang berhasilnya penyuluhan tersebut, sebagian besar responden (60,5 %) juga kurang setuju jika usaha PKL di trotoar melanggar perda tersebut. Bahkan 72,9 % responden yang diteliti mengklaim bahwa usaha mereka tidak mengganggu keindahan kota (Tabel IV.32). Yang agak memprihatinkan adalah 54,2 % responden (Tabel IV.34) merasa tidak berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan usaha mereka. Sementara mengenai larangan berjualan di lokasi-lokasi tertentu lainnya, 64,2 % responden (Tabel IV. 35) menyatakan tidak paham dan menurut mereka hal itu hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh pemerintah untuk menarik retribusi.
4. Dari variabel karakteristik lingkungan PKL dapat ditarik kesimpulan mengenai kebersihan dimana 71,6 % responden (tabel IV.36) menyatakan bahwa kondisi lingkungan usaha mereka yang bersih terbatas pada usaha

di kios PKL tempat mereka sendiri. Hal ini tampak dari 61,8 % responden (tabel IV.37) berpendapat tidak setuju terhadap kios PKL yang di atas saluran air dapat merusak lingkungan, namun pada kenyataannya mereka selalu membuang limbah ke saluran air tanpa melihat lebih lanjut lagi. Selain hal-hal di atas, kondisi arus lalu lintas, keamanan dan ketertiban cukup baik. Namun perlu diketahui bahwa sikap warga di sekitar PKL tampaknya menunjukkan antipati terhadap keberadaan PKL.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa diantara faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku PKL terhadap Perda No.11/2000, ternyata terlihat bahwa kurangnya pemahaman terhadap perda menunjukkan pengaruh yang mengkhawatirkan terhadap perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah. Hal ini menunjukkan walaupun para PKL merasa berlaku tertib, taat, menjaga kebersihan kiosnya sendiri, keamanan, serta membayar retribusi, akan tetapi sebagian besar diantara mereka belum memahami Perda No.11/2000. Alhasil perilaku PKL tersebut masih jauh dari harapan yang diinginkan dengan dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik beserta tingkat pemahaman terhadap perda yang rendah.

B. SARAN

Pengelolaan PKL di Semarang tidak lepas dari kebijakan publik yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang. Keberadaan PKL menjadi fenomenal, karena pada satu sisi seringkali sektor ini dianggap mengganggu ketertiban kota, namun pada sisi lain mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

Karakteristik PKL menjadi salah satu hal yang perlu dicermati. Sebab pada aspek ini seringkali terjadi friksi sosial yang cukup rentan.. Dalam hal ini Perda No.11/2000. Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan maka disarankan agar :

1. Setelah melihat hasil penelitian yang menunjukkan rendahnya pemahaman PKL terhadap Perda No. 11/2000, maka perilaku PKL walaupun dipandang cukup baik namun ternyata pemahamannya terhadap perda tersebut cukup rendah Dengan demikian masih diperlukan sosialisasi perda berkaitan dengan PKL dengan alternatif yang berbeda dengan yang sudah ada.
2. Perlunya menumbuhkan kesadaran dari masing-masing PKL dan lingkungan di sekitarnya untuk melakukan aktivitasnya sebagai PKL yang paham terhadap segala tanggung jawabnya sebagai bagian dari warga kota Semarang.
3. Pelaksanaan program sosialisasi Perda No.11/2000 di Kecamatan Semarang Tengah perlu dikoordinasi dengan instansi terkait. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Semarang Tengah sebagai sentra kota Semarang sudah seharusnya menjadikan panutan bagi wilayah lainnya dalam pengaturan dan pembinaan PKL.
4. Pendelegasian dan pelimpahan wewenang dari walikota ke kecamatan dalam implementasi perda tersebut harus direalisasikan dengan program khusus yang mampu merespons dan menanggapi masalah PKL. Sebagai contoh perlu dibangun hubungan kemitraan antara PKL itu sendiri dengan pemerintah kota dalam memberdayakan eksistensi PKL.

5. Pemberdayaan PKL tidak saja meliputi penempatan yang representatif, tetapi juga kemudahan yang lebih luas dalam hal pemberian dan peruntukan lahan, penyuluhan tentang lingkungan, pemberian bantuan kredit, dsb.

Dari kesimpulan di atas, maka pentingnya peningkatan pemahaman terhadap Perda No.11/2000 ini juga menjadi tonggak terhadap pemahaman PKL dan warga kota Semarang dalam mendukung segala peraturan dan kebijakan. Dengan demikian tujuan dari kebijakan tersebut akhirnya dapat dicapai dengan baik.

Akhir kata, hasil penelitian tentang perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah ini mengindikasikan perilaku PKL yang masih kurang memuaskan walaupun dinilai cukup baik. Hal ini disebabkan belum banyak PKL yang memahami Perda No. 11/2000. Dengan demikian, dalam penelitian yang akan datang perlu diteliti lebih lanjut mengenai kebijakan sosialisasi dan pemberdayaan PKL di Kota Semarang.

DAFTAR REFERENSI

- Chandrakirana, Kamala dan Isono Sadoko. 1995. *Dinamika Ekonomi Informal di Jakarta : Industri Daur Ulang, Angkutan Becak, dan Dagang Kakilima*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Danim, Sudarwan. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Edisi Pertama. Penerbit PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Diponegoro, Universitas. 2001. *Buku Pedoman Penyusunan Tesis*. Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Administrasi Publik. UNDIP. Semarang.
- Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Ferdinand, Augusty T. 2000, 2002. *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen. Aplikasi Model-model Rumit Dalam Penelitian Untuk Tesis Magister dan Disertasi Doktor*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Flynn, Norman. 1993. *Public Sector Management*. Second Edition. Harvester Wheatsheaf. Hertfordshire. Great Britain.
- Gibson, Ivancevich. 1996. *Organisasi Perilaku, Struktur, Proses*. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Henry, Nicholas. 1995. *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Publik*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Islamy, M Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Penerbit PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Joglo Pos. 2002. Edisi I/Tahun III – 15 Mei 2002. PKM Joglo UNDIP. Semarang.
- Kompas, Harian Untuk Umum. Tahun 2000 – 2002. Jakarta
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia. Jakarta.
- Nusantara, Kompas Media. 1999. *Demokratisasi dan Otonomi Mencegah Disintegrasi Bangsa*. PT Kompas Media Nusantara. Jakarta.

- P Hadi, Sudharto. 2001. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Semarang, Pemerintah Kota. 2000. *Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Semarang kepada DPRD Kota Semarang*. Pemerintah Kotamadya Semarang.
- Semarang Tengah, Kecamatan. 2000. *Arsip Pedoman Pengelolaan Pedagang Kaki Lima*. Kecamatan Semarang Tengah.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Edisi Revisi. PT Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.
- Suara Merdeka, Harian. Tahun 2000 – 2002. Semarang.
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2001. *Responsi Pemerintah Terhadap Kesenjangan Ekonomi Studi Empiris Pada Kebijakan dan Program Pembangunan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*. Penerbit PerPod. Jakarta.
- Syafiie, Inu; Djamaludin Tandjung dan Supardan Modeong. 1997. *Ilmu Administrasi Publik*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Thoha, Miftah Thoha. 2000. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Fisipol UGM. Penerbit Pt RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
- Warsono, Hardi. 2000. *Bacaan Untuk Mata Kuliah Konsep dan Manajemen Pembangunan*. Buku II. Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Administrasi Publik. UNDIP. Semarang.
- Widodo, Ahmadi.---2000. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Kota Semarang)*; Tesis. Magister Teknik Pembangunan Kota. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.